

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai tata naskah dinas, klasifikasi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - b. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 118);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berpedoman Pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai Pedoman Penomoran Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 580) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PATI

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

I. PENDAHULUAN.

Tujuan Pola Klasifikasi Kearsipan antara lain sebagai pedoman penomoran surat dan memberikan petunjuk surat sesuai dengan permasalahannya sehingga mudah diketemukan kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menciptakan system pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip.

Salah satu sub sistem dari sistem pengendalian yang dimaksud ialah mengklasifikasikan surat yang artinya memisahkan surat atas dasar perbedaan yang ada dan mengelompokannya atas dasar persamaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar memudahkan penemuan kembali arsip sehingga pelayanan penyajian informasi kepada pimpinan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Mengingat fungsi Pola Klasifikasi Kearsipan dapat digunakan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, maka penyusunan pola klasifikasi ini diarahkan dalam rangka kegunaannya bagi kepentingan petugas arsip maupun pimpinan sebagai penunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN.

1. Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pati merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pola Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dalam hubungan masalah, dengan 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar.

2. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara Tugas Substantif (pokok) dan tugas Fasilitatif (Penunjang).

3. Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas Fasilitatif.

Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah Pengawasan, Kepegawaian dan Keuangan.

Disamping itu juga ditampung masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti; Protokol, urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti; Perjalanan dinas, Peralatan, Lambang Negara atau Daerah, Tanda-tanda Kehormatan dan sebagainya.

Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pati.

Sepuluh Kelompok Pokok Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan / Ketertiban
400	Kesejahteraan Rakyat
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

4. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini menunjukkan adanya urutan sistematis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

5. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode Pembantu yang dimaksud adalah :

01. Perencanaan
02. Penelitian

- 03. Pendidikan
- 04. Laporan
- 05. Panitia
- 06. Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07. Statistik
- 08. Peraturan Perundang-undangan
- 09. Tidak dipakai

III. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami Pola Klasifikasi, terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama, merupakan bagian dan sub ordinat dari kode di atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah misalnya 412 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 410. Selanjutnya diketahui bahwa 410 merupakan bagian dari 400, disamping itu perlu diperhatikan kekhususan kelas 000.

Contoh :

- 400 Kesejahteraan Rakyat (perincian Pertama)
- 410 Pembangunan Desa (Perincian Kedua)
- 411 -
- 412 Perekonomian Desa (Perincian Ketiga)

2. Untuk dapat mengklasifikasikan surat dengan kode setepat-tepatnya harus dipahami masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang mana masalah itu disajikan. Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya “prinsip” surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh Karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.
3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.

Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya dan harus diyakini benar, bahwa masalah itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci.
5. Kode Pembantu.

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.

Dengan ditambahkan kode pembantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang lebih spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.

Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan. Oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci, maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai 900.

Begitu juga dengan Pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun, dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.

7. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan 2 macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu sama-sama benar.

Contoh :

- a. Peraturan Pemerintah tentang Pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188 Peraturan Pemerintah, atau 882 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan Pensiun (882), ditambahkan dengan kode pembantu untuk Perundang-Undangan (08).
- b. Penelitian penghasilan Pamong Desa, dapat diklasifikasikan 070 (penelitian) atau 142.02 (Penelitian Penghasilan Pamong Desa). Masalahnya penghasilan Pamong Desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode pembantu.

PERINCIAN DASAR

000	UMUM
100	PEMERINTAHAN
200	POLITIK
300	KEAMANAN / KETERTIBAN
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
500	PEREKONOMIAN
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700	PENGAWASAN
800	KEPEGAWAIAN
900	KEUANGAN

PERINCIAN KEDUA

000	UMUM
010	Urusan Dalam
020	Barang dan Jasa
030	Kekayaan Daerah
040	Perpustakaan / Dokumen / Kearsipan / Sandi
050	Perencanaan dan Evaluasi
060	Organisasi / Ketatalaksanaan
070	Penelitian dan Pengembangan
080	Konferensi / Rapat Koordinasi
090	Perjalanan Dinas
100	PEMERINTAHAN
110	Pemerintahan Pusat
120	Pemerintah Provinsi
130	Pemda Kabupaten / Kota
140	Pemerintah Desa / Kelurahan
150	Legislatif MPR / DPR / DPD
160	DPRD Provinsi
170	DPRD Kabupaten / Kota
180	Hukum
190	Hubungan Luar Negeri
200	POLITIK
210	Kepartaian
220	Organisasi Kemasyarakatan
230	Organisasi Profesi & Fungsional
240	Organisasi Pemuda
250	Organisasi Buruh, Tani, Nelayan
260	Oganisasi Wanita

270	Pemilihan Umum, Pilkada
280	Pengawasan Pemilu / Pilkada
300	KEAMANAN / KETERTIBAN
310	Pertahanan
320	Kemiliteran / TNI
330	Keamanan
340	Perlindungan Masyarakat
350	Kejahatan
360	Bencana
370	Kecelakaan
380	Pendampingan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
390	Kerjasama BPBD dengan instansi lain
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
410	Pembangunan Desa / Kelurahan
420	Pendidikan
430	Kebudayaan
440	Kesehatan
450	Agama
460	Sosial
470	Kependudukan dan Catatan Sipil
480	Media Massa
500	PEREKONOMIAN
510	Perdagangan
520	Pertanian
530	Perindustrian
540	Energi dan Sumber Daya Mineral
550	Perhubungan
560	Tenaga Kerja
570	Penanaman Modal
580	Perbankan / Moneter
590	Agraria
600	PEKERJAAN UMUM & KETENAGAAN
610	Pengairan
620	Jalan
630	Jembatan
640	Bangunan
650	Tata Ruang Kota
660	Tata Lingkungan
670	Ketenagaan
680	Peralatan Pekerjaan Umum
690	Air Minum
700	PENGAWASAN
710	Bidang Pemerintahan
720	Bidang Politik
730	Bidang Keamanan / Ketertiban
740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
750	Bidang Perekonomian
760	Bidang Pekerjaan Umum
770	Pengawasan Pejabat Publik

780	Bidang Kepegawaian
790	Bidang Keuangan
800	KEPEGAWAIAN
810	Pengadaan
820	Pengangkatan & Mutasi
830	Kedudukan
840	Kesejahteraan Pegawai
850	CUTI
860	Penilaian
870	Tata Usaha Kepegawaian
880	Pemberhentian
890	Pendidikan Pegawai

900	KEUANGAN
910	Anggaran
920	Otorisasi
930	Verifikasi
940	Pembukuan
950	Perbendaharaan
960	Pembinaan Kebendaharaan
970	Pendapatan
980	Evaluasi dan Pengendalian
990	Pengelolaan Kas Daerah

PERINCIAN KETIGA

KODE KLASIFIKASI BARU / TAMBAHAN

000	UMUM
001.	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
001.4	Bandir / Umbul-umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (khusus untuk non PNS) (untuk Pegawai lihat 861 - 1)
002.1	Bintang
002.2	Satya Lencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan Secara Adat
002.6	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya / Besar Nasional
003.1	Hari Besar Nasional, 17 Agustus, Hari Pahlawan, hari Anak, HKS dsb
003.2	Hari Raya Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun / HUT (Hari Jadi Provinsi/Kab. /Kota)
003.4	Sedekah bumi, bersih desa
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri

- 004.4 Bela Sungkawa
- 004.5 Ucapan Lainnya

- 005 Undangan

- 006 Tanda Jabatan
- 006.1 Pamong Praja
- 006.2 Pejabat Lainnya
- 007 Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah

- 010 URUSAN DALAM**
- 011 Gedung kantor, termasuk instalasi
- 011.1 Instalasi Listrik
- 011.2 Telepon
- 011.3 Otomasi
- 011.4 Air Minum
- 011.5 Hydrant
- 011.6 Alarm
- 011.7 Internet

- 012 Rumah Dinas
- 012.1 Tanah untuk Rumah Dinas
- 012.2 Perabotan

- 013 Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)
- 013.1 Mess
- 013.2 Wisma
- 013.3 Hotel
- 014 Rumah susun/apartemen
- 015 Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop)
- 016 Pengurusan kendaraan dinas
- 017 Keamanan / ketertiban kantor
- 018 Kebersihan Kantor

- 019 Protokol
- 019.1 Upacara Bendera
- 019.11 Petugas Upacara
- 019.12 Inspektur Upacara

- 019.2 Tata Tempat
- 019.21 Pemasangan gambar presiden/ Wakil Presiden

- 019.3 Audiensi

- 019.4 Alamat – Alamat Kantor dan Pejabat
- 019.41 Pindah Alamat

- 019.5 Penerimaan Tamu
- 019.6 Kerjasama

- 020 BARANG DAN JASA**
- 021 Penawaran
- 021.1 Penawaran Barang
- 021.2 Penawaran Jasa

- 022 Barang
- 022.1 Barang bergerak
- 022.2 Barang tidak bergerak

- 023 Jasa

- 024 Alat Angkutan
- 024.1 Orang
- 024.2 Barang

- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata

- 027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, Penunjukan, lelang
- 027.1 Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan /
anwijzing, negosiasi,
evaluasi
- 027.2 SPK, Kontrak/Amandemen / Addendum, Teguran
- 027.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 027.4 Serah terima pekerjaan
- 027.5 Pemeriksaan pekerjaan
- 027.6 Perpanjangan waktu / force majeure
- 027.7 Denda
- 027.8 Sanggahan
- 027.9 Pemeliharaan barang/jasa
- 028 Inventaris
- 028.1 Pendataan Barang Milik Negara
- 028.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
- 028.3 Penghapusan Barang Milik Negara

- 029 Pengurusan Kendaraan
- 029.1 STNK, BPKB

- 030 KEKAYAAN DAERAH**
- 031 Barang-barang Tidak Bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hu-
tan, tambak)
- 032 Barang-barang Tidak Bergerak (gedung, asrama, monu-
men/bangunan berseja-
rah dll)
- 033 Tanaman
- 034 Alat-alat Berat
- 035 Hewan
- 036 Barang persediaan dalam gudang
- 037 Alat Pengangkut (darat, laut, udara)
- 038 Peralatan Pabrik, Laboratorium
- 039 Peralatan kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)

- 040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI**
- 041 Perpustakaan
- 041.1 Perpustakaan Umum
- 041.2 Perpustakaan Khusus
- 041.3 Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 041.4 Perpustakaan Sekolah

- 041.5 Perpustakaan Keliling
- 042.6 Pengadaan Bahan Pustaka
- 041.61 Pengolahan (katalog, bibliografi)
- 041.7 Pelayanan Perpustakaan/sirkulasi
- 041.71 Keanggotaan
- 041.72 Pembinaan Perpustakaan
- 041.73 Bantuan buku, rak
- 041.73 Bimbingan teknis Perpustakaan
- 041.74 Sosialisasi Perpustakaan
- 041.75 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan
- 041.76 Pameran Bahan Perpustakaan
- 041.8 Pemeliharaan, Pelestarian, Alih media
- 041.81 Deposit
- 041.82 Penghapusan / penyusutan bahan perpustakaan
- 041.9 Kerjasama Antar Perpustakaan, Kemitraan, Forum Perpustakaan

- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -

- 045 Kearsipan
- 045.1 Pola Klasifikasi
- 045.12 Pengurusan Surat

- 045.2 Akuisisi Arsip
- 045.21 Pengolahan Arsip
- 045.22 Pendataan Berkas
- 045.23 Penataan Berkas
- 045.24 Daftar Arsip

- 045.3 Penyusutan Arsip
- 045.31 Jadwal Retensi Arsip
- 045.32 Penilaian Arsip
- 045.33 Pemindahan Arsip
- 045.34 Penyerahan Arsip
- 045.35 Pemusnahan Arsip
- 045.36 Berita Acara Penyerahan Arsip

- 045.4 Pembinaan Kearsipan
- 045.41 Pengawasan
- 045.42 Bimbingan Kearsipan

- 045.5 Perawatan, Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
- 045.51 Fumigasi
- 045.52 Termite Control
- 045.53 Restorasi
- 045.54 Laminasi
- 045.55 Alih Media
- 045.56 Kapur baru
- 045.57 Suhu dan Kelembaban Arsip

- 045.6 Layanan
- 045.7 Pemasyarakatan
- 045.71 Pameran Kearsipan
- 045.72 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
- 045.73 Sosialisasi Kearsipan
- 045.74 Penelusuran Arsip

- 045.8 Pengembangan Sistem
- 045.81 Sistem Kearsipan
- 045.82 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

- 046 Sandi
- 047 Telegram, Telex, Radio, ISB, Faximile
- 048 Data Elektronik
- 049 Arsip Teknologi Maju

050 PERENCANAAN

Meliputi Rencana Pembangunan dan Perencanaan Umum

Departemen

Dalam Negeri.

Klasifikasi disini meliputi: Proyek-proyek Pembangunan, Program Pembangunan Nasional (Propenas), Program Pembangunan daerah (Properda, RKA, RASK), Laporan Fisik dan Keuangan Proyek Pembangunan, SIAP, Tender, Pemborong, Laporan, Pelaksanaan Kinerja, Musrenbangpus antar kementerian, Musrenbangnas. Musrenbangdes

- 050.1 Program Pembangunan Nasional (Propenas)
- 050.2 Program Pembangunan Daerah (Properda)
- 050.3 Rencana Kerja SKPD
- 050.4 Program Pembangunan Desa (Properdes)

- 051 Bidang Pemerintahan
- 051.1 DUP
- 051.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 051.3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 051.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PPJPD)
- 051.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPJMD)
- 051.6 Rencana Strategis (RENSTRA)
- 051.7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 051.8 Rencana Kerja (Renja)

- 052 Bidang Politik
- 052.1 Laporan Keuangan
- 052.11 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- 052.12 Neraca
- 052.13 Catatan Laporan Keuangan (CLK)

- 052.2 Laporan Pelaksanaan Kinerja
- 052.21 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- 052.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- 052.23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- 053 Perencanaan Kegiatan Pembangunan
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 055 Bidang Perekonomian
- 056 Bidang Pekerjaan Umum
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan

- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN**
- 061 Organisasi
- 061.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- 061.2 Tata Tertib Kantor, pengaturan hari dan Jam Kerja pegawai

- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan
- 065.1 Tata Naskah Dinas
- 065.2 Stempel
- 065.21 Stempel Jabatan
- 065.22 Stempel Dinas
- 065.3 Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah
- 065.4 Alamat – alamat kantor dan pejabat
- 065.5 Ketentuan pakaian dinas dan atribut

- 066 Tata Hubungan Kerja

- 067 Standard Operasional Prosedur

- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
- 068.1 Pemantauan Pelaksanaan
- 068.2 Sistem Prosedur Kerja
- 068.3 Evaluasi Pelaksanaan Sistem
- 068.4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan

- 069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
- 069.1 Analisa Jabatan
- 069.2 Hasil Analisis Jabatan
- 069.3 Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
- 069.4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
- 069.5 Uraian Jabatan

- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
- 071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri
- 075 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta
- 076 Kerjasama Penelitian dengan LSM
- 077 Kerjasama Penelitian dengan Swasta (CV / PT)
- 078 Studi Kelayakan, Studi Banding
- 079 Studi Kasus

- 080 KONFERENSI**
- 081 Gubernur
 - 082 Bupati / Walikota
 - 083 Komponen, Eselon lainnya
 - 084 Instansi lainnya
 - 085 Internasional di Dalam Negeri
 - 086 Internasional di Luar Negeri
 - 087 –
 - 088 –
 - 089 –
- 090 PERJALANAN DINAS**
- 091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
 - 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
 - 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
 - 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
 - 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
 - 096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
 - 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
 - 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
 - 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN**
- 101 –
 - 102 –
 - 103 –
 - 104 –
 - 105 –
 - 106 –
 - 107 –
 - 108 –
 - 109 –
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT**
- 111 Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah
 - Serah Terima Jabatan.
 - 111.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
 - 111.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
 - 112 Wakil Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan.
 - 113 Susunan Kabinet
 - 113.1 Reshuffle
 - 113.2 Penunjukan Menteri Ad Interim
 - 113.3 Sidang Kabinet, Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
 - 114 Kementerian Dalam Negeri
 - 114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri
 - 115 Kementerian lainnya
 - 116 Lembaga Tinggi Negara
 - 117 Lembaga Non Kementerian
 - 118 Otonomi Desentralisasi

- 119 Kerjasama antar Kementerian
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI**
- 120.01 Kebijakan Pemerintah Provinsi
- 120.02 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur
- 120.03 Monografi, tambahkan kode wilayah
- 120.1 Koordinasi
- 120.11 Organisasi Perangkat Daerah
- 120.12 Instansi Vertikal
- 120.13 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah dan Luar Negeri
- 121 Gubernur
Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 122 Wakil Gubernur
Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Daerah
Meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan
- 124 Badan - badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
- 125 Pembentukan / Pemekaran
- 125.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 125.2 Pembentukan Wilayah
- 125.3 Perubahan Batas Wilayah
- 125.4 Pemekaran Wilayah
- 125.5 Penambahan Ibu Kota Provinsi, Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dan sebagainya.
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja
- 129 -
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA**
- 130.01 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- 130.02 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota
- 130.03 Monografi
- 130.1 Koordinasi
- 130.11 Organisasi Perangkat Daerah
- 130.12 Instansi Vertikal
- 130.13 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah dan Luar Negeri
- 131 Bupati
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, laporan pertanggungjawaban (LPJ), team memori dan sebagainya.
- 132 Wakil Bupati
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, dan sebagainya.

- 133 Sekretaris Daerah
Meliputi pencalonan, serah terima jabatan
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Muspida
- 135 Pembentukan Daerah
 - 135.1 Pembentukan Daerah Otonom
 - 135.2 Pembentukan Wilayah
 - 135.3 Perubahan Batas Wilayah
 - 135.4 Pemekaran Wilayah
 - 135.5 Permasalahan Batas Wilayah
 - 135.6 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya
 - 135.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah dan jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan / Pendelegasian Kewenangan
- 138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
 - 138.1 Sambutan / Pengarahan / Amanat
 - 138.2 Pembentukan kecamatan
 - 138.3 Pemekaran kecamatan
 - 138.4 Perluasan / Perubahan batas wilayah kecamatan
 - 138.5 Pemindahan ibu kota kecamatan
 - 138.6 Laporan kecamatan
 - 138.7 Monografi
- 139 –
- 140 PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN**
- 141 Kepala Desa,
Kelurahan meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan,
pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima dan sebagainya.
 - 141.1 Biaya pemilihan kepala desa
 - 141.2 Badan Pemusyawaratan Desa, meliputi pembentukan keanggotaan
dan kepengurusan
 - 141.3 Perangkat Desa, Kelurahan
 - 141.31 Sekretaris Desa, Kelurahan meliputi pencalonan, penyeleksian,
pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara.
 - 141.32 Perangkat Desa, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan,
pemberhentian, pemberhentian sementara.
- 142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APB Des/Kel)
 - 142.1 Rutin (termasuk penghasilan perangkat desa)
 - 142.2 Pembangunan
 - 142.3 Anggaran Belanja Tambahan
 - 142.4 Pendapatan Desa
 - 142.41 Urusan Desa
 - 142.42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - 142.43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi
 - 142.44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah kabupaten / Kota
 - 142.45 Penerimaan yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah yang
diserahkan kepada desa

- 142.46 Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa.
- 142.47 Pendapatan Asli Desa
- 142.48 Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 142.49 Hasil dari gotong royong masyarakat.

- 143 Kekayaan Desa
- 143.1 Tanah hak pakai desa
- 143.11 Tanah bengkok
- 143.12 Tanah titisara
- 143.13 Tanah Penganggonan
- 143.14 Tanah desa lainnya
- 143.15 Bondo Desa

- 143.2 Jalan desa
- 143.3 Bangunan desa

- 144 Lembaga-lembaga tingkat desa
- 144.1 BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)

- 145 Administrasi Desa/Kelurahan
- 145.1 Pengurusan Surat Keterangan
- 145.2 Monografi

- 146 Kewilayahan
- 146.1 Pemekaran desa / kelurahan
- 146.2 Pembentukan desa / kelurahan
- 146.3 Perubahan batas wilayah / perluasan desa / kelurahan
- 146.4 Perubahan nama desa / kelurahan
- 146.5 Permasalahan batas desa
- 146.6 Penyatuan desa / kelurahan
- 146.7 Penghapusan desa / kelurahan

- 147 RT-RW

- 148 Pembangunan desa
- 148.1 Pembinaan usaha gotong – royong
- 148.11 Swadaya Gotong – royong
- 148.12 Lembaga Sosial Desa (LSD)
- 148.13 Latihan Kerja Masyarakat
- 148.14 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 148.15 Penyuluhan
- 148.16 Kelembagaan Desa

- 148.2 Perekonomian Desa
- 148.21 Produksi Desa
- 148.22 Keuangan Desa
- 148.23 Koperasi Desa
- 148.24 Penataan bantuan pembangunan desa
- 148.25 Alokasi bantuan pembangunan desa
- 148.26 Pelaksanaan bantuan pembangunan desa

- 148.3 Prasarana desa
- 148.31 Pembinaan
- 148.32 Bimbingan Teknis

- 148.33 Pemukiman kembali penduduk
- 148.34 Masyarakat pradesa
- 148.35 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa

- 148.4 Pengembangan desa
- 148.41 Tingkat perkembangan desa
- 148.42 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
- 148.43 Tata Desa
- 148.44 Perlombaan desa

- 148.5 Koordinasi
- 148.51 Sektor Khusus (SK)
- 148.52 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
- 148.53 Team koordinasi pusat
- 148.54 Kerjasama

- 149 RT – RW / RK

- 150 **LEGISLATIF MPR / DPR / DPD****
- 151 Keanggotaan MPR
- 151.1 Pencalonan
- 151.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 151.3 Pemberhentian
- 151.31 Recall
- 151.32 Meninggal
- 151.4 Pelanggaran
- 151.5 Pergantian Antar Waktu

- 152 Persidangan

- 153 Kesejahteraan
- 153.1 Keuangan
- 153.2 Penghargaan

- 154 Hak

- 155 Keanggotaan DPR
- 155.1 Pencalonan
- 155.2 Pengangkatan
- 155.3 Pemberhentian
- 155.31 Recall
- 155.32 Meninggal
- 155.4 Pelanggaran

- 156 Persidangan
- 156.1 Sidang Pleno
- 156.2 Dengar Pendapat
- 156.3 Rapat Komisi
- 156.4 Reses

- 157 Kesejahteraan
- 157.1 Keuangan
- 157.2 Penghargaan

- 158 Jawaban Pemerintah

159	Hak
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan
161.3	Pemberhentian
161.31	Recall
161.32	Meninggal
161.4	Pelanggaran
162	Persidangan
162.1	Sidang Pleno
162.2	Dengar pendapat
162.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus dsb
162.4	Fraksi
162.5	Tata tertib
162.6	Reses
162.7	Peninjauan, study banding
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Provinsi
166	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN / KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Pemberhentian
171.31	Recall
171.32	Meninggal
171.4	Pelanggaran
172	Persidangan
172.1	Sidang pleno
172.2	Dengar pendapat
172.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi panitia khusus dsb
172.4	Fraksi
172.5	Tata tertib
172.6	Reses
172.7	Peninjauan, study banding
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan

- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten / Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -

- 180 HUKUM**
- 180.1 Konstitusi
- 180.11 Dasar Negara
- 180.12 Undang – undang Dasar
- 180.13 Undang – undang
- 180.14 Peraturan Pemerintah
- 180.15 Keppres/Perpres/Inpres
- 180.16 Kepmen/Permen/Inmen
- 180.17 Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Perda, KepGub/PerGub/InGub
- 180.18 Perundangan Tingkat kabupaten/Kota meliputi Perda, Kep-Bup/KepWal, Per Bup/Per Wal
- 180.19 perundangan Tingkat Desa meliputi peraturan Desa, Keputusan Kepala desa

- 180.2 Tap MPR
- 180.3 Konvensi

- 181 Perdata
- 181.1 Tanah
- 181.2 Rumah
- 181.3 Utang Piutang
- 181.31 Gadai
- 181.32 Hipotek
- 181.4 Notariat

- 182 Pidana
- 182.1 Tindak Pidana Umum
- 182.2 Tindak Pidana Khusus

- 183 Peradilan
- 183.1 Jenis – jenis peradilan
- 183.11 Peradilan umum
- 183.111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
- 183.112 Pengadilan Tinggi
- 183.113 Mahkamah Agung

- 183.12 Peradilan Agama Islam
- 183.121 Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
- 183.122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
- 183.123 Mahkamah Islam Agung

- 183.13 Peradilan Militer
- 183.131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
- 183.132 Mahkamah Militer Tinggi
- 183.133 Mahkamah Militer Agung

183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombudsman
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verzet
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan Hukum
183.41	Pembina Kesadaran Hukum (KADARKUM)
183.5	Bantuan Hukum
183.51	Lembaga Bantuan Hukum
183.6	Notaris
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas Batas / Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi narapidana
186.2	Pembinaan narapidana
186.3	Pembebasan narapidana
186.4	Tahanan titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntutan Umum
187.2	Penuntutan Khusus
188	Hukum Adat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	laporan Luar Negeri
197	-
198	-
199	-

200 POLITIK

- 201 Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
- 201.1 Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 201.2 Kesatuan bangsa organisasi kekuatan sosial politik
- 201.3 Organisasi kemasyarakatan
- 201.4 Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya
- 201.5 Keadaan politik luar negeri
- 201.6 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
- 201.7 Hasil Evaluasi dan Tata mengenai Ipoleksosbud, Kamtibmas

- 202 Partai / Organisasi terlarang
- 202.1 Keputusan pembubaran partai / organisasi terlarang
- 202.2 Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang
- 202.3 izin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang
- 202.4 Daftar berkala mengenai keadaan organisasi / anggota partai / organisasi terlarang.
- 202.5 Laporan umum mengenai keadaan anggota partai / organisasi terlarang

- 203 Organisasi Kemasyarakatan
- 203.1 LSM
- 203.2 Yayasan
- 203.3 Organisasi
- 203.4 Pembentukan organisasi
- 203.5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 203.6 Kepengurusan dan daftar organisasi
- 203.7 Program kerja organisasi
- 203.8 Munas / Musda Tk. I dan Tk. II
- 203.9 Pembinaan Organisasi
- 203.91 Kegiatan organisasi
- 203.92 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 203.93 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 203.94 Pembentukan organisasi
- 203.95 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 203.96 Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi
- 203.97 Program kerja organisasi
- 203.98 Laporan kegiatan organisasi
- 203.99 Penertiban STIPKO (Surat Tanda terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi)

- 204 Orde Baru
- 205 Orde Pemerintahan
- 206 Reformasi
- 207 -
- 208 -

210 KEPARTAIAN

- 211 Partai Peserta Pemilu
- 212 Pendirian / Pembentukan PARPOL
- 212.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
- 212.2 Program Kerja, data kegiatan PARPOL
- 212.3 Pembinaan PARPOL

- 212.4 Hasil Munas / Musda PARPOL
- 212.5 Struktur / Kepengurusan, Pengkaderan dan keanggotaan PARPOL
- 212.6 Data inventaris dan keuangan PARPOL

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 221 Pembentukan Organisasi
- 221.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 221.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 221.3 Program Kerja Organisasi
- 221.4 Munas / Musda provinsi dan Kabupaten/Kota

- 222 Pembinaan Organisasi
- 222.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 222.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

- 223 Berdasarkan Perjuangan
- 223.1 Perintis Kemerdekaan
- 223.2 Angkatan 45
- 223.3 Veteran

- 224 Berdasarkan kekaryaan
- 224.1 PEPABRI
- 224.2 Wreda Tama
- 224.3 Pensiunan PNS

- 225 Berdasarkan Kerohanian
- 225.1 Muhammadiyah
- 225.2 NU
- 225.3 Persatuan Sarikat Islam
- 225.4 -
- 225.5 -

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

- 231 Pembentukan Organisasi
- 231.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 231.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 231.3 Program Kerja Organisasi
- 231.4 Munas / Musda provinsi dan Kabupaten/Kota
- 231.5 Pembinaan Organisasi
- 231.6 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 231.7 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

- 232 Ikatan Dokter Indonesia
- 233 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 234 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 235 Persatuan Advokat Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Asosiasi Arsiparis Indonesia
- 239 Ikatan Pustakawan Indonesia

240 ORGANISASI PEMUDA

- 241 Pembentukan Organisasi
- 241.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 241.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi

241.3	Program Kerja Organisasi
241.4	Munas / Musda provinsi dan Kabupaten/Kota
241.5	Pembinaan Organisasi
241.6	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
241.7	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
242	Komite Nasional Pemuda Indonesia
243	Organisasi Mahasiswa
244	Organisasi Pelajar
245	Gerakan Pemuda Ansor
246	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
247	Gerakan Pemuda Marhaenis
248	Karang Taruna
249	–
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	Pembentukan Organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
251.3	Program Kerja Organisasi
251.4	Munas / Musda provinsi dan Kabupaten/Kota
251.5	Pembinaan Organisasi
251.6	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
251.7	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
252	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
253	Organisasi Buruh Internasional
254	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
255	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
256	–
257	–
258	–
259	–
260	ORGANISASI WANITA
261	Pembentukan Organisasi
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
261.3	Program Kerja Organisasi
261.4	Munas / Musda provinsi dan Kabupaten/Kota
261.5	Pembinaan Organisasi
261.6	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
261.7	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
262	Dharma Wanita
263	Kongres Wanita Indonesia
264	Persatuan Wanita Republik Indonesia
265	–
266	–
267	–
268	–
269	–

270	PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
271	Pencalonan
272	No Urut / Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Surat
277	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislative
278.2	Penetapan pemenang Pilkada
279	KPU / KPUD
280	PENGAWASAN PEMILU
281	Pemantauan Pemilu
282	Pelanggaran Pemilu
283	Sengketa Pemilu
284	Panwaslu
285	–
286	–
287	–
288	–
289	–
290	–
291	–
292	–
293	–
294	–
295	–
296	–
297	–
298	–
299	–
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
300.5	Laporan dari instansi yang berwenang
300.6	Laporan adanya kejadian / unjuk rasa
300.7	Laporan adanya kejadian teroris
300.8	Pengamanan sidang (tamunegara)
300.9	Pengawasan pejabat
301	Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakan pelaksanaan perda

304	Pembinaan / penyuluhan pelanggaran perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawasan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
308	–
309	–
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
317	–
318	–
319	–
320	KEMILITERAN / TNI
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaan TNI
325	TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)
326	–
327	–
328	–
329	–
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
331.2	Polisi Pamong Praja / Satpol PP
332	Huru-hara / Demonstrasi
333	Senjata Api / Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng, Pengaduan
337	Ijin Keramaian
338	Pengaduan Masyarakat
339	Himbauan atau Larangan
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Linmas
341.2	Pendidikan / Pelatihan Linmas
341.3	Pelatihan PAM Swakarsa
341.4	Pendidikan / Pelatihan Menwa

- 342 Pengerahan dan Pengendalian Linmas
- 343 Kesejahteraan bagi anggota Linmas
- 343.1 Pemberian Tali Asih bagi anggota
- 343.2 Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
- 343.3 Santunan uang duka bagi anggota Linmas
- 343.4 Penghargaan bagi anggota Linmas
- 344 Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
- 344.1 Linmas Lanjut Usia
- 345 Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat
- 346 Kegiatan Pelaksanaan Linmas
- 347 –
- 348 –
- 349 –

350 KEJAHATAN

- 351 Makar / Pemberontakan
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganaiayaan, Pencurian / Perampasan / Perampokan
- 354 Subversi / Penyelundupan / Narkotika
- 355 Pemalsuan / Penipuan
- 355.1 Uang
- 355.2 Ijazah
- 355.3 Kejahatan pemalsuan lainnya
- 356 Korupsi / penyelewengan / penyalahgunaan jabatan
- 357 Kekerasan pada perempuan dan anak
- 357.1 Pelaporan
- 357.2 Penanganan korban
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis dll)

360 BENCANA

- 360.1 Pelatihan
- 360.2 Surat keputusan
- 360.3 Berita Acara
- 361 Gunung Berapi / Gempa/Tsunami
- 362 Banjir / Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
- 364.1 Pemadam Kebakaran
- 365 Kekeringan dan Air bersih
- 366 Posko Bencana
- 367 Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan
- 368 MOU pemerintah Pusat BNPB
- 369 –

370 KECELAKAAN

- 371 Latihan SAR
- 372 Latihan Keterampilan Penyelamatan di air dan menyelam
- 373 Latihan manajemen bagi pejabat
- 374 Satkorlak dan Satlak PBP
- 375 Latihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
- 376 Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
- 377 Kecelakaan Darat, Laut, Udara
- 378 Investigasi / Penyelidikan kecelakaan
- 379 Asuransi Kecelakaan

380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan Teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan Lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
389	-
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi Pemerintah Pusat
392	Instansi Pemerintah Daerah
393	Lembaga International
394	Lembaga non pemerintah nasional
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Jamkesmas
402	Bantuan Keluarga Miskin
403	-
404	-
405	-
406	-
407	-
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
411	Pembinaan usaha gotong – royong
411.1	Swadaya gotong – royong
411.11	Penataan gotong – royong
411.12	Gotong – royong dinamis
411.13	Gotong – royong statis
411.14	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.21	Pembinaan
411.22	Klasifikasi
411.23	Proyek
411.24	Musyawarah
411.3	Latihan Kerja Masyarakat
411.31	Kader Masyarakat
411.32	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.33	Pusat Pelatihan
411.34	Kursus – kursus
411.35	Kurikulum / Syllabus

- 411.37 Ketrampilan
- 411.37 Pramuka

- 411.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 411.41 Program
- 411.42 Pembinaan Organisasi
- 411.43 Kegiatan

- 411.5 Penyuluhan
- 411.51 Publikasi
- 411.52 Peragaan
- 411.53 Sosio Darma
- 411.54 Siaran Pedesaan
- 411.55 Kelompokcapir
- 411.56 Penyuluhan Lapangan

- 411.6 Kelembagaan Desa
- 411.61 Kelompok Tani
- 411.62 Rukun Tani
- 411.63 Subak
- 411.64 Dharma Tirta
- 411.65 P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

- 412 Perekonomian Desa
- 412.1 Produksi Desa
- 412.11 Pengolahan
- 412.12 Pemasaran

- 412.2 Keuangan Desa
- 412.21 Perkreditan Desa
- 412.22 Inventarisasi Data
- 412.23 Perkembangan / Pelaksanaan
- 412.24 Bantuan / Simulasi
- 412.25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan

- 412.3 Koperasi Desa
- 412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- 412.32 Koperasi Usaha Unit Desa (KUD)

- 412.4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
- 412.41 Jumlah desa yang diberi bantuan
- 412.42 Pengarahan
- 412.43 Pusat
- 412.44 Daerah

- 412.5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- 412.51 Pusat
- 412.52 Daerah

- 412.6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- 412.61 Bantuan Langsung
- 412.62 Bantuan Keserasian
- 412.63 Bantuan Juara Lomba Desa

- 413 Prasarana Desa
 - 413.1 Pembinaan
 - 413.11 Bimbingan Teknis
 - 413.2 Pemukiman kembali penduduk
 - 413.21 Lokasi
 - 413.22 Diskusi
 - 413.23 Pelaksanaan
 - 413.3 Masyarakat Pradesa
 - 413.31 Pembinaan
 - 413.32 Penyuluhan
 - 413.4 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
 - 413.41 Rumah Sakit
 - 413.42 Proyek Perintis Pelaksanaan
 - 413.43 Pengembangan
 - 413.44 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - 414.1 Tingkat perkembangan desa
 - 414.11 Jumlah desa
 - 414.12 Pemekaran desa
 - 414.13 Pembentukan desa baru
 - 414.14 Evaluasi
 - 414.15 Bagian
 - 414.16 Data Desa Tertinggal
 - 414.2 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
 - 414.21 Penyuluhan Program / Fasilitas Program
 - 414.22 Lokasi UDKP
 - 414.23 Pelaksanaan
 - 414.24 Bimbingan / Pembinaan
 - 414.25 Evaluasi
 - 414.3 Tata Desa / Profil Desa dan Kelurahan
 - 414.31 Inventarisasi
 - 414.32 Penyuluhan Pola Tata Desa
 - 414.33 Pemetaan
 - 414.34 Pedoman Pelaksanaan
 - 414.35 Evaluasi
 - 414.4 Perlombaan Desa
 - 414.41 Pedoman
 - 414.42 Penilaian
 - 414.43 Kejuaraan
 - 414.44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - 415.1 Sektor Khusus (SK)
 - 415.2 Rapat Koordinasi Horisontal
 - 415.3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - 415.4 Kerjasama
 - 415.41 Luar Negeri (Unicef)
 - 415.42 Perguruan Tinggi
 - 415.43 Departemen / Lembaga non Departemen

- 416 –
- 417 –
- 418 –
- 419 –

- 420 PENDIDIKAN**
- 420.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan
- 420.2 Pendidikan Karakter Bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
- 420.3 Pendidikan Kemasyarakatan
- 421 Sekolah (termasuk akreditasi)
- 421.1 Prasekolah (PAUD, Playgroup)
- 421.2 Sekolah Dasar
- 421.3 Sekolah Menengah
- 421.4 Sekolah Kejuruan
- 421.5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas dll)
- 421.6 Kegiatan Sekolah, Diesnatalis, Lustrum
- 421.7 Kegiatan Pelajar diantaranya Reuni, Darmawisata, Lomba
- 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- 421.9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf

- 422 Administrasi Sekolah
- 422.1 Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, Pendaftaran, Mapram, Perpeloncoan, Ospek
- 422.2 Tahun Pelajaran
- 422.3 Hari Libur
- 422.4 Uang Sekolah, diantaranya SPP, BP3
- 422.5 Beasiswa dan Penghargaan siswa berprestasi
- 422.6 Ijazah, Sertifikat

- 423 Metode Belajar, Wajib Belajar
- 423.1 Kuliah
- 423.2 Ceramah, Simposium, Seminar
- 423.3 Diskusi
- 423.4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN
- 423.5 Kurikulum
- 423.6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
- 423.7 Ujian

- 424 Tenaga Pengajar
Guru, Dosen; Dekan, Rektor

- 425 Sarana Pendidikan
- 425.1 Gedung
- 425.11 Gedung Sekolah
- 425.12 Kampus
- 425.13 Pusat kegiatan
- 425.14 Perpustakaan
- 425.15 Laboratorium
- 425.2 Buku
- 425.3 Perlengkapan Sekolah
- 425.4 Sistem Informasi Pendidikan

- 426 Keolahragaan
- 426.1 Cabang Olahraga
- 426.2 Sarana
- 426.21 Gedung Olahraga
- 426.22 Stadion
- 426.23 Lapangan
- 426.24 Kolam Renang

- 426.3 Pesta Olahraga
- Klasifikasi disini : PON, PORSADA, Olimpiade, PORSENI
- 426.4 Hobby

- 427 Kepemudaan
- Meliputi organisasi dan kegiatan remaja klasifikasi disini;
- Gelanggang Remaja

- 428 Kepramukaan

- 429 Pendidikan Kedinasan
- Untuk Departemen dalam Negeri lihat 890

- 430 KEBUDAYAAN**
- 431 Kesenian
- 431.1 Cabang Kesenian
- 431.2 Sarana
- 431.21 Gedung Kesenian
- 431.22 Padepokan
- 431.23 Ganasidi

- 432 Kepurbakalaan
- 432.1 Museum
- 432.2 Peninggalan Kuno
- 432.21 Candi, termasuk pemugaran
- 432.22 Benda

- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenian
- 436 Kepercayaan
- 437 Festival Pentas Seni
- 438 –
- 439 –

- 440 KESEHATAN**
- 441 Pembinaan Kesehatan
- 441.1 Gigi
- 441.2 Mata
- 441.3 Jiwa
- 441.4 Kanker
- 441.5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- 441.6 Perawatan
- 441.7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- 441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
- 441.9 Sistem Kesehatan Nasional
- 441.91 JPS BK (Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan)

- 442 Obat-obatan
- 442.1 Pengadaan
- 442.2 Penyimpanan
- 442.3 Obat Generik
- 442.4 Pemalsuan
- 442.5 Obat Terlarang

- 443 Pemberantasan Penyakit
- 443.1 Pencegahan
- 443.2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
- 443.21 Kusta
- 443.22 Kelamin, HIV, AIDS, IMS
- 443.23 Frambusia
- 443.24 TBC

- 443.3 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
- 443.31 Kholera
- 443.32 Imunisasi
- 443.33 Surveilense
- 443.34 Antrak
- 443.35 Leptosirosis
- 443.36 Chikungunya
- 443.37 SARS

- 443.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
- 443.41 Malaria
- 443.42 Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah, DHF)
- 443.43 Filaria
- 443.44 Serangga
- 443.45 Rabies

- 443.5 Higiene Sanitasi
- 443.51 Tempat – tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman, jasa boga (TPPMM)
- 443.52 Sarana Air Minum
- 443.53 Pestisida
- 443.54 Pencemaran Udara
- 443.55 Jamban Keluarga
- 443.56 Kesehatan Institusi

- 443.6 Pemberantasan Penyakit tidak Menular
- 443.61 A Pectoris
- 443.62 IMA
- 443.63 Hipertensi
- 443.64 Stroke
- 443.65 Diabetes Militus (DM)
- 443.66 CA. Service
- 443.67 CA. Mammae
- 443.68 CA. Hepar
- 443.69 CA. Paru

- 443.7 DEKOPENSATIOKORDIS
- 443.71 PPOM
- 443.72 Asma
- 443.73 Kecelakaan lalu lintas
- 443.74 Psikosis

- 444 Gizi
- 444.1 Kekurangan Makanan
- 444.2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
- 444.3 Keracunan Makanan
- 444.4 Menu Makanan Rakyat
- 444.5 Gondok Epidemik (GAKY)

- 445 Rumah Sakit
- 445.1 RSUP
- 445.2 Rumah Sakit Jiwa
- 445.3 Rumah Sakit Mata
- 445.4 Puskesmas dan Puskesmas Keliling
- 445.5 Poliklinik (Balai Kesehatan)
- 445.6 Rumah Bersalin
- 445.7 Posyandu
- 445.8 Rumah Sakit / Balai Kesehatan lainnya
- 445.9 Laboratorium Kesehatan

- 446 Tenaga Medis
- 446.1 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- 446.2 Diklat Tenaga Kesehatan (Medis)
- 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan (Paramedis)
- 446.4 Pendidikan Kesehatan

- 447 Peralatan Kesehatan
- 447.1 Pengadaan Alat Kesehatan
- 447.2 Penyimpanan Alat Kesehatan
- 447.3 Standarisasi Alat Kesehatan
- 447.4 Penghapusan Alat Kesehatan

- 448 Pengobatan Tradisional
- 448.1 Pijat
- 448.2 Tusuk Jarum
- 448.3 Jamu Tradisional
- 448.4 Dukun

- 449 Perijinan
- 449.1 Surat Ijin Praktek (SIP)
- 449.2 Surat Ijin Kerja (SIK)

- 450 AGAMA**
- 451 Islam
- 451.1 Peribadatan
- 451.11 Sholat
- 451.12 Zakat, Fitrah
- 451.13 Puasa
- 451.14 Haji (jangan diklasifikasikan disini lihat 456)

451.2	Rumah Ibadah; Masjid
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan
451.41	Pendidikan Tinggi
451.42	Pendidikan Menengah
451.43	Pendidikan Dasar
451.44	Pondok Pesantren
451.45	Gedung Sekolah
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Buku
451.48	Dakwah
451.49	Organisasi / Lembaga Pendidikan
451.5	Harta Agama Wakaf, Baitamal dsb
451.6	Organisasi keagamaan bukan Politik, Majelis Ulama
451.7	Mazhab
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah; Gereja
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
452.4	Mazhab
452.5	Organisasi Gerejani
453	Katholik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah; Gereja
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastur
453.4	Mazhab
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah; Pura
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi PHDI
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah; Vihara
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisasi
456	Konghucu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah; Klentheng
456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
456.4	Mazhab
456.5	Organisasi
457	Urusan Haji
458	-
459	-

460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penderita Cacat
461.1	Cacat Mata
461.2	Cacat Tubuh
461.3	Cacat Mental
461.4	Bisu / Tuli
462	Tuna Sosial
462.1	Gelandangan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak Nakal
462.5	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan anak / keluarga
463.1	Anak putus sekolah
463.2	Ibu teladan
464	Pembinaan Pahlawan
464.1	Pahlawan Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya.
464.2	Perintis Kemerdekaan Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya.
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan Meliputi: Penyelenggaraan undian, ketangkasan, baasar dsb
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana dsb.
468	PMI
468.1	Donor Darah
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN
471	Kewarganegaraan Indonesia
471.1	WNI Asli

- 471.2 WNI Keturunan Asing
- 471.21 Permohonan kewarganegaraan
- 471.22 Permohonan ganti nama

- 471.3 Asimilasi

- 472 Kewarganegaraan Asing
- 473 Tidak berkewarganegaraan (stateless)

- 474 Pendaftaran Penduduk / Perpindahan Penduduk
- 474.1 Kelahiran
- 474.11 Adopsi

- 474.2 Perkawinan / perceraian / rujuk
- 474.3 Kematian
- 474.4 Kartu Penduduk
- 474.5 Kartu Keluarga
- 475 Transmigrasi
- 475.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
- 475.11 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
- 475.12 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.13 Pemasarakatan / sosialisasi transmigrasi
- 475.14 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi terkait
- 475.15 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
- 475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.17 Kerjasama di bidang transmigrasi
- 475.18 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik

- 475.2 Pemukiman transmigrasi
- 475.21 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
- 475.22 Pengembangan, Struktur Wilayah dan Analisis Data wilayah transmigrasi
- 475.23 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
- 475.24 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi / peta informasi pemukiman
- 475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum / sosial dan jaringan transportasi
- 475.26 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
- 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokas pemukiman transmigrasi

- 475.28 Tata ruang pemukiman transmigrasi
- 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
- 475.282 Rancangan kapling TSM
- 475.283 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
- 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
- 475.285 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
- 475.286 Pengukuran batas unit pemukiman

- 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.29 Sarana pemukiman transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.292 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475.293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
- 475.294 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
- 475.295 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan

- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
- 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.32 Teknis penyuluhan dan motifasi dalam pengarahan dan penempatan
- 475.33 Pengerahan
- 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
- 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
- 475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan

- 475.34 Pemberangkatan transmigran
- 475.341 Pengangkutan transmigrasi melalui laut, udara dan darat
- 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
- 475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
- 475.344 pengawalan perjalanan transmigran
- 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
- 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan

- 475.35 Penempatan transmigran
- 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
- 475.352 Pendataan transmigrasi di lokasi yang masih dibina
- 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
- 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (Transito), dan pelatihan transmigran
- 475.41 pelatihan transmigran
- 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
- 475.412 Penyusunan silabus dan modus pelatihan
- 475.413 penyusunan calon peserta / pelatih

- 475.42 Penampungan transmigran di transito
- 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
- 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
- 475.423 Pelayanan perbekalan / peralatan bagi transmigran

- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
- 475.51 Identifikasi dan penjajagan pembinaan
- 475.511 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- 475.512 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- 475.513 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan

- 475.52 Pembinaan pendidikan
- 475.521 Penyediaan / penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan

- 475.522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
- 475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat

- 475.54 Pembinaan kesehatan
- 475.541 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
- 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- Pendistribusian bantuan pangan

- 475.55 Pembinaan rokhani
- 475.551 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
- 475.552 Bimbingan adaptasi masyarakat
- 475.553 Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial

- 475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi
- 475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
- 475.58 Penilaian transmigran teladan
- 475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha

- 476 Keluarga Berencana
- 476.1 Alat kontrasepsi
- 476.2 KB Lestari
- 476.3 KB Mandiri
- 476.4 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
- 476.5 Pos KB desa
- 476.6 Akseptor KB

- 477 Catatan Sipil
- 478 -
- 479 -

- 480 MEDIA MASSA**
- 480.1 Penerbitan
- 480.11 Surat Kabar
- 480.12 Majalah
- 480.13 Buletin
- 480.14 Klasifikasi Berita
- 480.15 Press Release
- 480.16 Layanan Informasi / Leaflet
- 480.17 Masukan Analisis Gubernur
- 480.18 Jurnal Mingguan Ringkasan Berita
- 480.19 Jurnal Mingguan Pendapat Umum

- 480.2 Liputan Media Massa
- 480.21 Liputan Rutin
- 480.22 Liputan Khusus
- 480.221 Arus Lebaran
- 480.222 Pemberangkatan dan Kepulangan Haji

- 480.3 Pencabutan Surat Ijin
- 480.31 Surat Kabar
- 480.32 Majalah
- 480.33 Buletin

- 480.4 Laporan dan Hasil Pemberitaan
- 480.41 Surat Kabar

480.42	Majalah
480.43	Buletin
480.44	Kegiatan Bidang
480.45	Grafika
482	Media Elektronik
482.1	RRI
482.2	Non RRI
482.3	ORARI
482.4	RAPI
482.5	TVRI
482.6	TV Swasta
482.7	Film
483	Reklame
483.1	Ketentuan pemasangan
483.2	Penerbitan
483.3	Pameran Non Komersial
484	Kewartawanan
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Terjadinya kasus Penghinaan, Pemukulan, Penganiayaan terhadap wartawan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada / dari Organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
484.6	Kebijakan Pimpinan Wartawan / Pendidikan Jurnalistik
484.7	Temu Pers / Konferensi pers
484.8	Pers Tour
484.9	Wawancara / Audiensi Wartawan
485	Penerangan
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian Information Center
486	Peningkatan Kapasitas Bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Organisasi Kemasyarakatan
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Bintek Pengurus LKM
487.13	Bahan Informasi Cetak LKM
487.14	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Media
487.15	Pelatihan Motivator Kapa Narkoba
487.16	Pembekalan LSM/Upaya PPBN
487.17	Bahan Informasi Sosialisasi PPBN
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas

487.22	Pertemuan Kehumasan
487.23	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
487.3	Luar Negeri
487.31	Promosi Luar Negeri
487.32	Kunjungan Wartawan Asing
488	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi
488.1	Pembuatan Foto Blow Up Slide
488.2	Tayangan Udara Tentang Kebijakan dan Hasil Pembangunan
488.21	Kran Info Grahadika
488.22	Halo Gubernur
488.23	Fokus Utama
488.3	Pelayanan Informasi Melalui Feature
488.4	Pelayanan Informasi Melalui Spot
488.41	Televisi
488.42	Radio
488.5	Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional
488.51	Karawitan
488.52	Wayang Kulit
488.53	Guyon Maton
488.6	Dialog Interaktif
488.61	Televisi (TVRI), Nasional
488.62	Radio
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan
489.2	Klasifikasi Naskah Sambutan
489.3	Himpunan Dialog Interaktif
489.4	Himpunan Naskah Rubrik
489.5	Himpunan Naskah Keynote Speaker
489.6	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
490	-
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-
497	-
498	-
499	-
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan Stabilisasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya.

504	-
505	-
506	-
507	-
508	-
509	-
510	PERDAGANGAN
	Klasifikasi disini : Tataniaga
510.1	Promosi Perdagangan
510.11	Pekan Raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.16	Pasar
510.17	Pertokoan, kios, PKL
510.2	Pelelangan, Distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran Hasil Industri
510.23	Penentuan Harga Pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan
510.41	Penerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin Prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan Antar Pulau
510.51	Kerjasama Bahan Baku
510.52	Industri Pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	Tera
510.61	Tera Ulang Ukuran
510.62	Takaran
510.63	Timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap Tanda Tera
510.66	Biaya Tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian/Kontrak
510.73	Serah Terima
510.8	Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik

- 510.9 Kemetrologian
- 510.91 Standar Tingkat Tiga
- 510.92 Standar Kerja Satuan Ukuran
- 510.93 Ukuran Metrologi
- 510.931 Peralatan
- 510.932 Laboratorium Metrologi
- 510.933 Tanki Ukur Mobil
- 510.934 Meter Taxi
- 510.935 KWH Meter
- 510.936 SPBU

- 511 Pemasaran
- 511.1 Sembilan Bahan Pokok
- 511.2 Pasar
- 511.3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 511.4 Pusat Perbelanjaan

- 512 Ekspor
- 512.1 Ekspor Hasil Industri
- 512.2 Ijin Ekspor
- 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
- 512.4 Managemen Perdagangan Internasional
- 512.5 Ekspor Hasil Industri
- 512.51 Kebijakan
- 512.52 Pemasaran

- 512.6 Pemberitahuan Ekspor Barang
- 512.7 Pengawasan Mutu Barang
- 512.8 Eksportir Terdaftar
- 512.9 Evaluasi dan Pelaporan

- 513 Import
- 513.1 Ijin Import
- 513.11 Pemberian Ijin
- 513.12 Pengendalian Ijin

- 513.2 Standard Mata Dagang Import
- 513.3 Managemen Perdagangan Intenasional

- 513.4 Kegiatan Import
- 513.41 Pembinaan Import
- 513.42 Pengendalian Import
- 513.43 Pemantauan Import

- 513.5 Faktor-faktor Pendukung
- 513.6 Pengawasan Mutu Barang Import

- 513.7 Penyaluran Kegiatan Import
- 513.71 Bahan Konsumsi
- 513.72 Bahan Baku
- 513.73 Bahan Penolong

- 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import

- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 514.1 Kerjasama Bahan Baku
- 514.2 Industri Pemasaran
- 514.3 Kontrak

- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 515.1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
- 515.11 Promosi dan Informasi
- 515.12 Pameran
- 515.13 Kerjasarna

- 516 Pergudangan
- Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
- 516.1 Peti kemas
- 516.2 Tangki Penyimpanan

- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi (Untuk BUUD, KUD Lihat : 412.3-412.32)
- 518.1 Bina Usaha Koperasi
- 518.11 Koperasi Pertanian dan Perkebunan
- 518.111 Koperasi Pertanian Tanaman Pangan
- 518.112 Koperasi Perkebunan

- 518.12 Koperasi Perikanan dan Peternakan
- 518.121 Koperasi Perikanan
- 518.122 Koperasi Peternakan

- 518.13 Permodalan Koperasi
- 518.131 Pemupukan Modal
- 518.132 Pemanfaatan Modal
- 518.133 Perbankan dan Asuransi
- 518.134 Permodalan Luar Koperasi
- 518.135 Kredit Program Umum
- 518.136 Kredit Program Khusus

- 518.14 Distribusi dan Jasa Koperasi
- 518.141 Distribusi Bahan Pokok
- 518.142 Distribusi Aneka Bahan
- 518.143 Distribusi Kerjasama Niaga
- 518.144 Jasa Angkutan
- 518.145 Jasa Perumahan
- 518.146 Aneka Jasa

- 518.15 Koperasi Kelistrikan, industri dan Telekomunikasi
- 518.151 Koperasi Kelistrikan
- 518.152 Koperasi Industri
- 518.153 Koperasi Telekomunikasi

- 518.2 Bina Lembaga Koperasi
- 518.21 Organisasi Koperasi
- 518.211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
- 518.212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
- 518.213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
- 518.214 Perangkaan koperasi

- 518.215 Pengakuan Koperasi Sekolah
- 518.216 Amalgamasi
- 518.217 Tertib Organisasi Koperasi
- 518.218 Penyelesaian Perselisihan / Persengketaan
- 518.219 Bimbingan Kesadaran Hukum

- 518.22 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
- 518.221 Rapat Anggota Koperasi
- 518.222 Pengurus dan Badan Pemeriksa
- 518.223 Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
- 518.224 BPP KUD

- 518.23 Bina Tata Laksana Koperasi
- 518.231 Klasifikasi KUD
- 518.232 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
- 518.233 Klasifikasi Koperasi Sekunder
- 518.234 Klasifikasi KUD Mandiri

- 518.24 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
- 518.241 Administrasi KUD
- 518.242 Administrasi Koperasi Perkotaan
- 518.243 Karyawan / Manager Koperasi
- 518.244 Sumber Daya Manusia
- 518.245 TKST
- 518.246 Penyaluran Alat Sekolah
- 518.247 Bantuan Pemda kepada Koperasi / KUD

- 518.25 Akuntansi
- 518.251 Akuntansi KUD
- 518.252 Akuntansi Koperasi Perkotaan
- 518.253 Akuntansi Koperasi Sekunder

- 518.26 Pengawasan Koperasi
- 518.261 Pengawasan Koperasi Primer
- 518.262 Pengawasan Koperasi Sekunder
- 518.263 Koperasi Jasa Audit
- 518.264 Kerjasama Kantor Akuntan

- 518.27 Penyuluhan Koperasi
- 518.271 Pembinaan Kader Koperasi
- 518.272 Masyarakat Umum
- 518.273 Forum Komunikasi
- 518.274 Kelompok Tani
- 518.275 PKKL
- 518.276 Penilaian Tingkat Nasional

- 518.3 UKM (Usaha Kecil Menengah)
- 518.31 Pembinaan Usaha
- 518.311 Pembinaan Usaha Kecil
- 518.312 Pembinaan Usaha Menengah

- 518.32 Kredit Usaha
- 518.321 Kredit Usaha Kecil
- 518.322 Kredit Usaha Menengah

- 518.33 Pengawasan Usaha
- 518.331 Pengawasan Usaha Kecil
- 518.332 Pengawasan Usaha Menengah

519 -

520 PERTANIAN

- Tanaman Pangan
- 521.1 Rencana dan Program
- 521.11 Bimas / Inmas Termasuk Kredit
- 521.12 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian

- 521.2 Produksi

- 521.21 Padi
- 521.211 Sawah
- 521.212 Gogo
- 521.213 Huma

- 521.22 Palawija
- 521.221 Kacang
- 521.222 Jagung
- 521.223 Ketela Pohon
- 521.224 Ubi-ubian
- 521.225 Kedelai

- 521.23 Hortikultura
- 521.24 Sayuran
- 521.25 Buah-buahan
- 521.26 Tanaman Hias
- 521.27 Perlebahan
- 521.28 Panen Gagal (Puso)

- 521.3 Sarana Usaha Pertanian
- 521.31 Peralatan
- 521.32 Meliputi traktor dsb
- 521.33 Pembibitan
- 521.34 Pupuk
- 521.35 Irigasi Pertanian
- 521.36 Rehabilitasi lahan Pertanian

- 521.4 Perlindungan tanaman
- 521.41 Penyakit
- 521.411 Penyakit Daun
- 521.412 Penyakit Batang

- 521.42 Hama
- 521.421 Hama Serangga, diklasifikasikan : wereng, walang sangit, tungro
- 521.422 Hama Tikus dan sejenisnya

- 521.43 Pemberantasan
- 521.44 Pestisida

- 521.5 Tanah Pertanian Pangan
- 521.51 Persawahan

521.52	Perladangan
521.53	Kebun
521.6	Pengusaha, Petani
521.7	Lahan Kritis / KTA
521.8	Pemasaran
521.81	Promosi
521.9	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendataan Areal
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna
522.21	Tata Kawasan
522.2 11	Pengurusan Kawasan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Ukur dan Pemetaan
522.231	Pengukuran
522.232	Perpetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	Areal HPH
522.312	SKHPH
522.313	Kerjasama
522.314	Pembatalan/ Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH

- 522.332 RKPH
- 522.333 Rencana Kerja Lima Tahun RKPH

- 522.34 Perpanjangan HPH

- 522.35 Produksi
 - 522.351 Target Produksi
 - 522.352 Produksi Kayu
 - 522.3 53 Produksi Non Kayu

- 522.36 Industri
 - 522.361 Industri Kayu HPH
 - 522.3 62 Industri Kayu Non HPH
 - 522.3 63 Industri Non Kayu

- 522.37 Pembinaan HPH
 - 522.371 Pelanggaran dan Sanksi
- 522.38 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
 - 522.381 Hutan Tanaman Industri Pulp
 - 522.382 HTI Pertukangan

- 522.39 Iuran Hutan

- 522.4 Sarana Usaha
 - 522.41 Standarisasi
 - 522.411 Kayu
 - 522.412 Non Kayu

- 522.42 Pengujian Hasil Hutan

- 522.43 Pengembangan
 - 522.43 1 Pengembangan Perusahaan
 - 522.432 Pengembangan Pemasaran

- 522.44 Pemasaran Hasil Hutan

- 522.45 Angkutan Hasil Hutan
 - 522.451 Sarana dan Prasarana
 - 522.452 Pembinaan dan Peningkatan Dava Hutan

- 522.46 Tata Usaha Hasil Hutan

- 522.5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
 - 522.51 Konservasi Jenis
 - 522.511 Satwa yang dilindungi
 - 522.512 Satwa yang tidak dilindungi
 - 522.513 Lembaga Konservasi Satwa
 - 522.514 Lembaga Konservasi Tumbuhan
 - 522.52 Kawasan Konservasi
 - 522.521 Cagar Alam (termasuk laut)
 - 522.522 Suaka Margasatwa
 - 522.523 Taman Wisata (termasuk laut)
 - 522.524 Taman Nasional

- 522.525 Taman Hutan Raya
- 522.526 Taman Baru
- 522.527 Hutan Lindung

- 522.53 Pengkajian Lingkungan
- 522.531 Amdal UKL, UPL Di Dalam Kawasan Hutan
- 522.532 Amdal UKL, UPL Di Luar Kawasan Hutan

- 522.54 Bina Cinta Alam
- 522.541 Kelompok Pecinta Alam
- 522.542 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
- 522.543 Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
- 522.544 LSM Lingkungan

- 522.55 Pengamanan Hutan
- 522.551 Jaga Wana
- 522.552 PPNS
- 522.553 Gangguan Keamanan Hutan
- 522.554 Bencana Alam
- 522.555 Kebakaran Hutan
- 522.556 Sengketa Hutan
- 522.557 Hama dan Penyakit
- 522.558 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
- 522.559 Alat dan Mesin Kehutanan

- 522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- 522.61 Pembenihan
- 522.611 Tegakan Benih
- 522.612 Pengadaan Benih
- 522.613 Pengujian dan Penyimpanan Benih
- 522.614 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 522.615 Pembibitan
- 522.616 Pengadaan dan Pengedar Bibit Bersertifikat
- 522.617 Pengadaan dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat

- 522.62 Tanaman Reboisasi
- 522.621 Lahan Kritis
- 522.622 Reboisasi Lahan FH
- 522.623 Rehabilitasi Tanah Hutan
- 522.624 Konservasi Tanah dan Air
- 522.625 Pengendalian, Perladangan
- 522.626 Penghijauan
- 522.627 Aneka Usaha Kehutanan

- 522.63 Perhutanan Sosial
- 522.631 Sutera Alam
- 522.632 Minyak Kayu Putih
- 522.633 Perlebahan

- 523 Perikanan dan Kelautan
- 523.1 Rencana dan Program
- 523.11 Penyuluhan
- 523.12 Teknologi

523.2	Produksi Perikanan
523.21	Pelelangan
523.22	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pembibitan
523.32	Daerah Penangkapan
523.33	Perizinan Pembudidayaan Ikan
523.4	Pemasaran
523.41	Eksport Komoditas Perikanan
523.5	Sarana Perikanan
523.51	Peralatan
523.52	Kapal
523.53	Pelabuhan
523.6	Pengendalian Hama dan Penyakit
523.7	Pengusaha, Nelayan
523.71	Kapal / Motor Boat
523.72	Jaring
523.73	Cold Storage
523.74	Tempat Es
523.8	Konservasi dan Suaka Laut
524	Peternakan
524.1	Produksi
524.11	Susu Ternak Rakyat
524.12	Telor
524.13	Daging
524.14	Sarang Burung
524.2	Sarana Usaha Peternakan
524.21	Pembibitan
524.22	Obat Hewan
524.23	Alsinak
524.24	Pakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Penyakit Hewan
524.32	Pos Kesehatan Hewan
524.33	Pemeriksaan Spesimen
524.34	Karantina
524.4	Pelayanan Usaha dan Pemasaran
524.41	Promosi Produksi Peternakan
524.42	Pernasaran Peternakan
524.43	Ijin Usaha Peternakan
524.5	Pengawasan dan Standarisasi
524.51	Rumah Potong Hewan
524.52	Laboratorium
524.53	Standarisasi Bibit Ternak

524.6	Pengembangan Peternakan
524.61	Inseminasi Buatan
524.62	Pembibitan
524.63	Kawasan Peternakan
524.64	Penyebaran Temak
524.7	Data dan Informasi
524.71	Data Peternakan
524.72	Informasi Peternakan
524.8	Organisasi Peternakan
524.81	Asosiasi Peternakan
524.82	Kelompok Tani Temak
525	Perkebunan
525.1	Rencana dan Program
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	Teh
525.23	Tembakau
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
525.27	Kopi
525.28	Aneka Tanaman
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Pembibitan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	Pupuk
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.6	Pengolahan Lahan
525.61	Terasiring
526	Ketahanan Pangan
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.31	Mutu Hasil
526.32	Pengelolaan Hasil Pangan
526.33	Pemasaran Hasil
526.34	Kemitraan
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan Pola Distribusi

- 526.42 Sarana dan Prasarana Distribusi
- 526.43 Pengadaan dan Cadangan Pangan

- 526.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
- 526.51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
- 526.52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
- 526.53 Sistem Informasi Pangan
- 527 -
- 528 -
- 529 -

530 PERINDUSTRIAN

- 530.1 Undang-undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin / Elektronik
- 533 Industri Kimia / Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
- 536.1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
- 537.1 Kerajinan Rakyat

- 538 Usaha Negara
- 538.1 Perjan
- 538.2 Perum
- 538.3 Persero

- 539 Perusahaan Daerah
- 539.1 PDAM
- 539.2 Percetakan Daerah
- 539.3 Apotik Daerah
- 539.4 Bank Pasar
- 539.5 PD BPR / BKK

540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN

- 541 Minyak Bumi / Bensin
- 541.1 Pengusahaan, SPBU
- 541.11 Eksploitasi
- 541.12 Kontrak Kerja
- 541.13 Pengolahan

- 541.2 Penyaluran
- 541.3 Tangki, Pompa, Tanker

- 542 Gas Bumi
- 543 Logam Mulia (Intan, Emas, Perak)
- 544 Logam
- 544.1 Timah
- 544.2 Aluminium, Boxit
- 544.3 Besi, termasuk Besi Tua
- 544.4 Tembaga

- 545 Aneka Tambang / Bahan Galian
- 545.1 Air Permukaan

545.2 Air Bawah Tanah
545.21 Perijinan
545.211 Sumur Artetis
545.212 Sumur Bor
545.213 Sumur Gali/Pasak
545.214 Mata Air
545.215 Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
545.22 Sumur Pantau
545.23 Pemasangan / Penyevelan Water Meter
545.24 Produksi / Nilai Perolehan Air (NPA)
545.25 Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan

546 Geologi
546.1 Vulkanologi.
546.11 Pengawasan Gunung Berapi
546.2 Sumber Daya Mineral

546.3 Volkanologi
546.31 Pengawasan Gunung Merapi
546.32 Panas Bumi

546.4 Hidrogeologi
546.5 Gerakan Tanah (Longsor, Amblesan)
546.6 Pengawas pengendalian

547 Hidrologi
548 Kesamudraan
549 -

550 PERHUBUNGAN

551 Perhubungan Darat
551.1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551.11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu – Rambu
551.12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13 Kecelakaan Lalu Lintas

551.2 Angkutan Jalan Raya
551.21 Perizinan
551.22 Terminal
551.23 Alat Angkutan
551.24 Jembatan Timbang / Lebih Muatan
551.25 Uji Mutu

551.3 Angkutan Sungai
551.31 Keselamatan, Rambu-Rambu
551.32 Lalu Lintas
551.33 Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34 Trayek
551.35 Sarana Kapal
551.36 Pelabuhan
551.37 Terminal
551.38 Kecelakaan
551.39 Perizinan

- 551.4 Angkutan Danau
- 551.41 Keselamatan, Rambu-Rambu
- 551.42 Lalu Lintas
- 551.43 Alur dan Kolam Pelabuhan
- 551.44 Trayek
- 551.45 Sarana / Kapal
- 551.46 Pelabuhan
- 551.47 Terminal
- 551.48 Kecelakaan
- 551.49 Perizinan
- 551.5 Feri
- 551.51 Sarana dan Prasarana / Kapal
- 551.52 Terminal
- 551.53 Pelabuhan
- 551.54 Trayek
- 551.55 Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
- 551.56 Keselamatan
- 551.57 Kecelakaan
- 551.58 Perawatan / Perbaikan
- 551.59 Perizinan

- 551.6 Perkereta-Apian
- 551.61 Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
- 551.62 Prasarana (Jalan/Jembatan)
- 551.63 Trayek
- 551.64 Angkutan Penumpang
- 551.65 Angkutan Barang
- 551.66 Keselamatan
- 551.67 Kecelakaan
- 551.68 Perawatan / Perbaikan
- 551.69 Perizinan

- 552 Perhubungan Laut
- 552.1 Lalu Lintas Angkutan Laut
- 552.11 Pelayaran dalam Negeri
- 552.12 Pelayaran Luar Negeri
- 552.13 Pelayaran Haji
- 552.14 Pelayaran Charter / Wisata Turis
- 552.15 Pelayaran Khusus
- 552.16 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu

- 552.2 Perkapalan-Alat Angkutan
- 552.21 Kapal Penumpang
- 552.22 Kapal Barang
- 552.23 Kapal Perang / Patroli / Negara
- 552.24 Kapal Tanker
- 552.25 Ponton / Tongkang
- 552.26 Kapal Layar
- 552.27 Kapal Layar Motor
- 552.28 Kapal Kontainer

- 552.3 Pelabuhan
- 552.31 Tanah / Lokasi
- 552.32 Alur Layar
- 552.33 Dermaga

552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan / Gedung / Gudang
552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan/Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	Pos
552.62	Minyak
552.63	Log
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan pokok
552.66	Peti Kemas / EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69	Bongkar Muat
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu-Rambu / Mercusuar
552.72	Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan / Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Sertifikasi kesempumaan Kapal
552.76	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang / kapal
552.82	Kecelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana / Prasarana
552.84	Pembajakan / Penyelundupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjangan Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Daerah

553.1	Perhubungan Udara
553.11	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.12	Penerbangan Domestik
553.13	Penerbangan luar negeri
553.14	Penerbangan Haji
553.15	Penerbangan Charter / Non Reguler
553.16	Penerbangan Khusus / Jembatan udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah / Lokasi
553.22	Landasan
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang
553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan / Gedung
553.27	Perlengkapan
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	Pos
553.42	Muatan Dalam Negeri
553.43	Muatan Luar Negeri
553.44	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelaikan
553.51	Kelaikan Pesawat Udara
553.52	Kelaikan Peralatan Penunjang
553.53	Kelaikan Personil Awak kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu-Rambu
553.62	Perakitan / Kalibrasi
553.63	Fasilitas keselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan / Gangguan
553.71	Kecelakaan Penumpang
553.72	Kecelakaan Barang
553.73	Gangguan Sarana / Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi
553.82	Asosiasi
553.83	SATPAM
553.84	Rally Udara / Lomba
553.9	Perizinan
553.91	Izin Terbang / Flight Approval
553.92	Usaha Kegiatan Penunjang penerbangan / E M P U

553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	POS
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan Fasilitas
554.12	Rehabilitasi / Perawatan
554.13	Bina Usaha / pengawasan / penertiban
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa Pos
554.22	Jasa Titipan
554.23	Jasa Giro
554.24	Benda pos / Perangkat
554.25	Sampul Peringatan
554.26	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
554.32	Pembukaan Agen/ Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyelundupan
555	Telekomunikasi
555.1	Telepon
555.11	Tetap
555.12	Bergerak
555.13	Wartel
555.14	IKRJG
555.2	USO
555.3	Telegram, Telex / SBB
555.4	Satelit
555.5	Stasiun bumi
555.6	Faximile
555.7	Frekwensi dan Informatika
555.71	Amatir Radio
555.72	KRAP
555.73	Radio Siaran Lokal
555.74	Televisi Siaran Lokal
555.75	Radio Konsensi Lokal
555.76	Radio Base Station
555.77	ISPU (Internet Service Providen)
555.78	Warnet

- 555.8 Pembinaan / Penertiban / Pengawasan
- 555.81 Wartel
- 555.82 Frekwensi Radio Lokal

- 555.9 Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
- 555.91 Perizinan
- 555.92 Amatir Radio
- 555.93 KRAP
- 555.94 Radio Siaran Lokal
- 555.95 Televisi Siaran Lokal
- 555.96 Radio Konsesi Lokal
- 555.97 Radio Base Station

- 556 Pariwisata dan Rekreasi
- 556.1 Usaha Pariwisata
- 556.11 Usaha Jasa Pariwisata
- 556.111 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, Pramuwisata, Kovensi Perjalanan Insentif dan Pameran, Impresariat, Konsultan Pariwisata dan Informasi Pariwisata
- 556.12 Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
- 556.13 Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Meliputi Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus
- 556.14 Usaha Sarana Pariwisata, Meliputi Usaha Akomodasi, Makan dan Minum, Angkutan Wisata, Sarana Wisata Tirta dan Kawasan Pariwisata
- 556.141 Ijin Pariwisata
- 556.142 Ijin Usaha Pariwisata
- 556.143 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
- 556.144 Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556.145 Ijin Usaha Sarana

- 556.15 Wisatawan
- 556.151 Wisatawan Nusantara
- 556.152 Wisatawan Mancanegara

- 556.16 Promosi dan Informasi Pariwisata
- 556.161 Dalam Negeri
- 556.162 Luar Negeri

- 556.2 Perhotelan
- 556.21 Status Hotel
- 556.22 Kelas Hotel
- 556.23 Tarif

- 556.3 Travel Service
- 556.31 Pramuwisata
- 556.32 Biro perjalanan / Angkutan Wisata
- 556.33 Souvenir
- 556.34 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)

- 556.4 Tempat Rekreasi
- 556.41 Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556.411 Ciptaan Tuhan
- 556.412 Hasil Karya Manusia

556.42 Rehabilitasi / Perawatan
556.43 Pengembangan fasilitas
556.44 Tanah/bangunan
556.45 Bina Usaha
556.46 Institusi
556.461 Asosiasi
556.462 Lembaga Kepariwisataaan

557 Metereologi
557.1 Curah Hujan
557.2 Hujan Buatan
557.3 Penoropongan Bintang
558 -
559 -

560 TENAGA KERJA

560.1 Data Permintaan TKI / TKW dari luar Negeri
560.11 Data Persediaan TKI / TKW dari Daerah

560.2 Job Order TKI Keluar Negeri Oleh PJTKI
560.3 Rekrutmen calon TKI / TKW

560.4 Seleksi Naker Keluar Negeri
560.41 Pendaftaran Dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42 Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
560.43 Pemeriksaan dan Hasil Cek kesehatan TKI / TKW

560.5 Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51 Permohonan Rekomendasi Passport
560.52 Perjanjian kerja TKI / TKW
560.53 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55 Pelatihan TKI / TKW

560.6 Pemberangkatan Naker
560.61 Pemberangkatan Keluar Negeri
560.62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke luar Negeri
560.63 Berita Acara Serah Terima TKI / TKW

560.7 Pemulangan Naker
560.71 Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
560.72 Pemulangan TKI / TKW ilegal
560.73 TKI / TKW Terkena Kasus Pidana

561.1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
561.2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Provinsi
561.3 Kebutuhan Fisik Minimum
561.4 Perhitungan upah Kerja (Termasuk didalamnya Upah lembur)
561.5 Laporan Data Remittance
561.6 Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW

- 562.1 Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
- 562.11 Penempatan NakerMandiri Profesional (TKMP)
- 562.12 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional (Termasuk di dalamnya penempatan pekerja anak)
- 562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha / Perluasan Kerja (Termasuk di dalamnya penempatan pekerja Cacat)

- 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

- 562.3 Lembaga Penyalur Naker
- 562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan antar Kerja Negara (AKAN)
- 562.32 Data Evaluasi Kinerja Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)
- 562.33 Pencabutan Ijin Penyaluran Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)

- 563.1 Pendidikan Pekerja
- 563.11 Pendidikan dan Latihan Kerja
- 563.12 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
- 563.13 Diklat di Luar Negeri (pemagangan)

- 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
- 563.21 Tempat Pelatihan (BLK)
- 563.22 Instruktur / Pelatihan
- 563.23 Modul / Silabus dan Bahan Praktek
- 563.24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
- 563.25 Sertifikat

- 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja

- 564 Tenaga Sukarela
- 564.1 Butsi
- 564.2 Padat Karya

- 565 Perselisihan Perburuhan
- 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
- 565.11 Pengaduan Perkara Perburuhan / NAKER (termasuk didalamnya pendaftaran / pencabutan perkara)
- 565.12 Pemeriksaan Perkara Perburuhan / NAKER
- 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan / NAKER
- 565.14 Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan / NAKER (termasuk didalamnya jadwal, tempat pelaksanaan sidang dan pemanggilan yang berperkara)
- 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (NAKER)
- 565.16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P)
- 565.17 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D / P4P)
- 565.18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D / P4P) beserta panitera

- 565.2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
- 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- 566.3 Keterangan Kelayakan atau Perlindungan Diri (APD) dalam bekerja
- 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 566.5 Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan, Hyperkes
- 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha (misal: suara bising, limbah, dll)
- 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
- 566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat / angkut)
- 566.82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (katel uap)
- 566.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 566.84 Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan
- 566.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran

- 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (shift malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
- 567.2 PHK Masal
- 567.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
- 567.4 Ijin Melakukan PHK
- 567.5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567.6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567.7 Pemberian Uang Pesangon, Bagi Pekerja Yang di PHK

- 568 Kesejahteraan Buruh
- 568.1 Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker
- 568.1.1 Pemilihan Pekerja Teladan
- 568.2 Perumahan Pekerja
- 568.3 Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
- 568.4 Koperasi Pekerja
- 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
- 568.6 Perpustakaan Pekerja
- 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
- 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja

- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
- 568.9.1 Lembaga Kerjasama Bipartid

- 569 Tenaga Kerja Orang asing
- 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- 569.4 Perjanjian Kerja dengan Negara Asing
- 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
- 569.6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja asing, Perselisihan Kerja dan Pengaduan Tenaga Kerja Asing
- 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja asing
- 569.9 Tenaga Kerja asing Ilegal

- 570 MODAL DOMESTIK**
- 570.1 Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi
- 570.2 Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten

- 571 Modal Asing
- 572 Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
- 573 Pasar Uang dan Modal
- 574 Saham

575	-
576	-
577	-
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung / Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran
	Check, giro wesel, transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Obyek Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil

- 592.31 Penetapan imbalan Bagi Hasil
- 592.32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
- 592.33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil

- 592.4 Gadai Tanah
- 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan gadai Tanah
- 592.42 Pelaksanaan gadai Tanah
- 592.43 Sengketa Gadai Tanah

- 592.5 Bimbingan dan Penyuluhan
- 592.6 Pengembangan
- 592.7 Yayasan Dana Landreform (YDL)

- 593 Pengurusan Hak-hak Tanah
- 593.1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
- 593.11 Sewa Tanah
- 593.111 Sewa Tanah Untuk tanaman Tertentu: Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus

- 593.2 Hak Milik
- 593.21 Perorangan
- 593.22 Badan Hukum

- 593.3 Hak Pakai
- 593.31 Perorangan
- 593.311 Warga Negara Indonesia
- 593.312 Warga Negara Asing

- 593.32 Badan Hukum
- 593.321 Badan Hukum Indonesia
- 593.322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang asing
- 593.33 Tanah Gedung-Gedung Negeri

- 593.4 Guna Usaha
- 593.41 Perkebunan Besar
- 593.42 Perkebunan Rakyat
- 593.43 Peternakan
- 593.44 Perikanan
- 593.45 Kehutanan
- 593.5 Hak Guna Bangunan
- 593.51 Perorangan
- 593.52 Badan Hukum
- 593.53 P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
- 593.54 Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5/65
- 593.55 Pemulihan Hak (pen Pres 4/1960)

- 593.6 Hak Pengelolaan
- 593.61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
- 593.62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan

- 593.7 Sengketa Tanah
- 593.71 Peradilan Perkara Tanah (lihat Juga 183)

- 593.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- 593.81 Pencabutan Hak

593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuat Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
599	-
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan Kontruksi, Industri Konstruksi
602	Prakualifikasi
602.1	Daftar Rekanan mampu
602.2	Tanda Daftar Rekanan
602.3	Kontraktor, Pemborong
602.4	Tender
602.5	Penunjukkan
602.51	Penunjukkan Langsung
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu seperti : Batu belah, Steen slaag, Split dan sebagainya
604.2	Aspal Aspal buatan, aspal alam (butas)
604.3	Besi dan Logam lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi Profil (konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Alumunium Profil
604.4	Bahan-bahan pelindung dan Pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu (Seperti: balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb)
604.7	Bahan penutup atap (genting, asbes gelombang)
604.8	Alat-alat penggantung dan pengunci

604.9 Bahan-bahan bangunan lainnya

605 INSTALASI

605.1 Instalasi bangunan

605.2 Instalasi Listrik

605.3 Instalasi Air / sanitasi

605.4 Instalasi Pengatur Udara

605.5 Instalasi akustik

605.6 Instalasi cahaya/penerangan

606 Konstruksi pencegahan

606.1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran

606.2 Terhadap Gempa

606.3 Terhadap Angin / Udara Panas

606.4 Terhadap kegaduhan

606.5 Terhadap gas / explosive

606.6 Terhadap serangga

606.7 Terhadap Radiasi atom

607 -

608 -

609 -

610 PENGAIRAN

611 Irigasi

611.1 BangunanWaduk

611.11 Bendungan

611.12 Tanggul

611.13 Pelimpahan Banjir

611.14 Menara pengambilan

611.15 Pembangunan dermaga

611.2 Bangunan pengambilan

611.21 Bendung

611.22 Bendung dengan pintu bilas

611.23 Bendung dengan pompa

611.24 Pengambilan bebas

611.25 Pengambilan bebas dengan pompa

611.26 Sumur dengan pompa

611.27 Kantung Lumpur

611.28 Silf Ekstretor

611.29 Escape channel

611.3 Bangunan Pembawa

611.31 Saluran

611.31 Saluran Induk

611.312 Saluran Sekunder

611.313 Suplesi

611.314 Tersier

611.315 Saluran Kwartar

611.316 Saluran Pasangan

611.317 Saluran tertutup / terowongan

- 611.32 Bangunan
- 611.321 Bangunan bagi
- 611.322 Bangunan bagi dan sadap
- 611.323 Bangunan sadap
- 611.324 Bangunan check
- 611.325 Bangunan terjun

- 611.33 Bax Tersier
- 611.34 Got miring
- 611.35 Talang
- 611.36 Syphon
- 611.37 Gorong-gorong
- 611.38 Pelimpahan samping

- 611.4 Bangunan pembuangan
- 611.41 Saluran
- 611.411 Saluran Pembuang Induk
- 611.412 Saluran Pembuang Sekunder
- 611.413 Saluran Pembuang Tersier

- 611.42 Bangunan
- 611.421 Bangunan outlet
- 611.422 Bangunan terjun
- 611.423 Bangunan penahan banjir

- 611.43 Gorong-gorong pembuang
- 611.44 Talang pembuang
- 611.45 Syphon pembuang

- 611.5 Bangunan lainnya
- 611.51 Jalan
- 611.511 Jalan Inspeksi
- 611.512 Jalan Logistik

- 611.52 Jembatan
- 611.521 Jembatan Inspeksi
- 611.522 Jembatan hewan
- 611.53 Tangga cuci
- 611.54 Kubangan kerbau
- 611.55 Waduk lapangan
- 611.56 Bangunan penunjang
- 6 11.57 Jaringan telepon
- 611.58 Stasiun Agro
- 611.59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan

- 612 Polder
- 612.1 Tanggul keliling
- 612.11 Tanggul
- 612.12 Bangunan penutup sungai
- 612.13 Jembatan

- 612 2 Bangunan Pembawa
- 612.21 Saluran
- 612.211 Saluran muka
- 612.212 Saluran pembawa induk

612.213 Saluran pembawa sekunder
 612 214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan

612.22 Bangunan bagi
 612.221 Gorong-gorong
 612.222 Syphon

612.3 Bangunan pembuang
 612.31 Stasiun Pompa Pembuangan

612.32 Saluran
 612.321 Saluran pembuangan induk
 6 12.322 Saluran pembuangan sekunder

612.33 Pintu Air Pembuangan
 612.34 Gorong-gorong Pembuangan
 612.35 Syphon Pembuangan

612.4 Bangunan lainnya
 612.41 Bangunan
 612.411 Bangunan Pengukur Air
 612.412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 61 2.413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 612.414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa

612.42 Rumah Petugas Eksploitasi

613 Pasang Surut
 613 1 Bangunan Pembawa
 613 11 Saluran
 613.111 Saluran Pembawa Induk
 613.112 Saluran Pembawa Sekunder
 613.113 Saluran Pembawa Tersier
 613.114 Saluran Penyimpanan Air
 613.115 Bangunan Pintu Pemasukan

613.2 Bangunan Pembuang
 613.21 Saluran
 613.211 Saluran Pembuang Induk
 613.212 Saluran Pembuang Sekunder
 613.213 Saluran Pembuang Tersier
 613.214 Saluran Penyimpanan Air
 613.215 Bangunan Pintu Pembuangan

613.3 Bangunan lainnya
 613.31 Kolom Pasang

613.32 Saluran
 613321 Saluran Lalu Lintas
 613.322 Saluran Muka

613.33 Bangunan
 613.331 Bangunan Penangkis Kotoran
 613.332 Bangunan Pengukur Muka Air
 613.333 Bangunan Pengukur Curah Hujan

613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talud
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan lainnya
616	Air Tanah
616. 1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan lainnya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621.	Jalan kota
621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja

621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.3 1	Pekerjaan tanah (earth work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong-gorong (culvert)
621.6	Buku Trotoar
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Median
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah samping
621.81	Tanaman
621.2	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
621 91	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621 95	Patok-patok R.O.W (Sempadan)
621.96	Rel Pengaman
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjon
622.	Jalan Luar Kota
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.15	Jembatan sementara
622 16	Kantor / Gedung Proyek
622.17	Barak kerja
622.18	Laboratorium lapangan
622.19	Rumah

622.2	Badan jalan
622.21	Pekerjaan tanah (earth work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavement)
622.31	Lapis Pondasi bawah
622.32	Lapis pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (Culvert)
622.43	Sub Drainage
622.5	Trotoar
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Median
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah Samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu Penerangan
622.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R.O.W (sempadan)
622.86	Rel Pengaman
622.87	Pagar
622.88	Turap Penahan
622.89	Bronjong
623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan kota
631.1	Daerah Penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara
631.21	Jalan Sementara
631.22	Jembatan Sementara

631.23	Kantor Proyek
631.24	Gedung Proyek
631.25	Barak Kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian Tanah
631.32	Timbunan Tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi Kepala Jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi Angker
631.5	Bangunan Bawah
631.51	Kepala Jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang / trotoar
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan Pengaman
631.71	Turap / penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupure
631.76	Krip
631.8	Bangunan Pelengkap
631.81	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
631.82	Patok Pengaman
631.83	Patok R.O.W (sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Medium
632	Jembatan pada jalan luar kota
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan

632.2	Bangunan Sementara
632.21	Jalan Sementara
632.22	Jembatan Sementara
632.23	Kantor Proyek
632.24	Gedung Proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium/lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan tanah (earth work)
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi Kepala Jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi Angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan atas
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang / trotoar
632.65	Sandaran
632.66	Talang gair
632.7	Bangunan Pengaman
632.71	Turap / penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan Pelengkap
632.8 1	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
632.82	Patok Pengaman
632.83	Patok R.O.W (Sempadan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Median
633	-
634	-
635	-
636	-

637 -
638 -
639 -

640 BANGUNAN

641 Bangunan Pemerintah
641.1 Gedung pengadilan
641.2 Rumah Pejabat Negara
641.3 Gedung DPR
641.4 Gedung Balai Kota
641.5 Penjara
641.6 Perkantoran

642 Bangunan Pendidikan
642.1 Taman Kanak-Kanak
642.2 SD & Sekolah Menengah
642.3 Perguruan Tinggi

643 Bangunan Rekreasi
643.1 Bangunan Olahraga
643.2 Gedung Kesenian
643.3 Gedung Pemancar

644 Bangunan Perdagangan
644.1 Pusat Perbelanjaan
644.2 Gedung Perdagangan
644.3 Bank
644.4 Perkantoran

645 Bangunan Pelayanan Umum
645.1 Mandi, cuci, kakus (MCK) umum
645.2 Gedung Parkir
645.3 Rumah Sakit
645.4 Gedung Telkom
646.5 Terminal Angkutan Udara

645.6 Terminal Angkutan Air
645.7 Terminal Angkutan Darat
645.8 Bangunan Keagamaan

646 Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1 Monumen
646.2 Candi
646.3 Kraton
646.4 Rumah Tradisional

647 Bangunan Industri

648 Bangunan Tempat Tinggal
648.1 Rumah Perkantoran
648.11 Inti / Sederhana
648.12 Sedang / Mewah

648.2 Rumah Pedesaan

648.21	Rumah contoh
648.3	Real Estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan Beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	Atap
649.4	Lantai/ langit-langit
649.41	Suspended
649.42	Solit
649.5	Pintu / jendela
649.51	Pintu Hermonik
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela Sorong
649.56	Jendela vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (Site & Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (Home Industri)
655	Daerah Rekreasi (Open Space)
655.1	Publik Garden
655.2	Spot & playing fields
655.3	Open Space
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assineering

657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengering Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpul
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
661	Daerah Hutan
662	Daerah Pemukiman
663	Pusat Pertumbuhan
664	Transportasi
665.1	Jaringan Jalan
665.2	Jaringan Kereta Api
665.3	Jaringan Sungai
666	-
667	-
668	-
669	-
670	KETENAGAAN
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan Non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas

671.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTh - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
071.27	PLTU -Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi Tenaga Listrik
671.31	Gardu Induk / Gardu Penghubung / Gardu Trafo
671.32	Saluran UdaraTegangan Tinggi
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	-
682	-
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intake
691.1	Broncaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (Screen)
691.5	Pintu Air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)

692.3	Tutup Penguras (Blow off)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693 .2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694. 12	Reservoir dibawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran Umum
694.62	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (air relief)
694.72	Katup Pelepas (blow off)
694.8	Bat Pelepas Tekanan (pressure reducing valve)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
701	Pengawasan Urusan Dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor
702	Pengawasan Peralatan
703	Pengawasan Kekayaan
704	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
705	Pengawasan Perencanaan Pengadaan / Proyek
706	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
707	Pengawasan Penelitian / Riset
708	Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas
709	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS

- 742.2 Fasilitas / Sarana
742.3 Mutu Pendidikan
- 743 Pengawasan Kebudayaan
743.1 Kebudayaan Daerah / Nasional
743.2 Kebudayaan Asing
744 Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat
745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi
748 Pengawasan Kehumasan / Media Massa
749 Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN**
751 Pengawasan Perdagangan
752 Pengawasan Pertanian
753 Pengawasan Perindustrian
754 Pengawasan Pertambangan / Kelautan
755 Pengawasan Perhubungan
756 Pengawasan Tenaga Kerja
757 Pengawasan PMDN / PMA
758 Pengawasan Perbankan / Moneter
759 Pengawasan Pertahanan / BPN
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**
761 Pengawasan Pengairan
762 Pengawasan Jalan
763 Pengawasan Jembatan
764 Pengawasan Bangunan
765 Pengawasan Tata Ruang Kota
766 Pengawasan Tata Lingkungan
767 Pengawasan Ketenagaan
768 Pengawasan Peralatan
769 Pengawasan Air Minum
770 Pengawasan Pejabat Publik
- 771 Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota
772 Serah Terima Jabatan Politik
773 Laporan Pertanggungjawaban Pusat
774 Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
775 Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota
776 Penolakan LPJ
777 Penyimpangan Pejabat Publik
778 Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
779 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN**
781 Pengawasan Pengadaan PNS
782 Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi
783 Pengawasan Kedudukan / Jabatan
784 Pengawasan Kesejahteraan PNS
785 Pengawasan Cuti
786 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
787 Pengawasan Pemberhentian PNS
788 Pengawasan Tata Usaha/ Administrasi PNS

789	Pengawasan Pendidikan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran / APBD
792	Pengawasan Otorisasi
793	Pengawasan Verifikasi
794	Pengawasan Pembukuan
795	Pengawasan Perbendaharaan
796	Pengawasan Pembinaan Perbendaharaan
797	Pengawasan Pendapatan / penerimaan pajak
798	Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
799	Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas
800	KEPEGAWAIAN
800.1	Klasifikasi disini: Kebijakan Kepegawaian Perencanaan
800.2	Penelitian
800.21	Pengaduan
800.22	Team
800.23	Statistik
800.24	Peraturan Perundang-undangan
810	PENGADAAN
	Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai
811	Lamaran
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
813.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
813.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
813.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
813.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
814	Pengangkatan Tenaga Non PNS
814.1	Pengangkatan Tenaga Kontrak APBN
814.2	Pengangkatan Tenaga Kontrak APBD / Kabupaten
814.3	Pengangkatan Tenaga Kontrak Unit Kerja / APBD
814.4	Pengangkatan Tenaga Wiyata Bakti / Harian Lepas
815	Pengangkatan Tenaga Asing
816	-
817	-
818	-
819	-
820	MUTASI
	Meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan, detasering, tugas belajar dan wajib militer.

820.1	Golongan I
820.2	Golongan II
820.3	Golongan III
820.4	Golongan IV
820.5	Fungsional
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (tetap)
821.11	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol I
821.12	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol II
821.13	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol III
821.14	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol IV
821.2	Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan
821.21	Sekjen / Dirjen / Kaban / Sekda / Sekdan / Asisten Sekda
821.22	Kepala Biro / Direktur / Inspektur/Kepala Pusat / Sekretaris / Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Kantor
821.23	Kepala Bagian / Kepala Sub Direktorat / Kepala Bidang / Inspektur Pembantu
821.24	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / Pemeriksa / UPTD / UPPD
821.25	Kepala Bakorlin Wilayah I
821.26	Camat
821.27	Lurah Administratif (Lurah desa lihat 141)
821.28	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	Pegawai Golongan I
822.2	Pegawai Golongan II
822.3	Pegawai Golongan III
822.4	Pegawai Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
823.1	Pegawai Golongan I
823.2	Pegawai Golongan II
823.3	Pegawai Golongan III
823.4	Pegawai Golongan IV
824	Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
824.1	Pegawai Golongan I
824.2	Pegawai Golongan II
824.3	Pegawai Golongan III
824.4	Pegawai Golongan IV
824.5	Lolos Butuh
825	Detasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar/Ijin Belajar
826.1	Dalam Negeri
826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
826.5	Ijin Belajar
826.6	Penggunaan Gelar

827	Wajib Militer
828	Mutasi Pegawai Instansi Lain
829	-
830	KEDUDUKAN
	Meliputi perhitungan masa kerja, Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah, Penghargaan ijasah dan jenjang pangkat
831	Perhitungan Masa Kerja
832	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
832.1	Pegawai Golongan I
833.2	Pegawai Golongan II
833.3	Pegawai Golongan III
833.4	Pegawai Golongan IV
833	Penghargaan Ijasah
834	Penghargaan Teknologi Tepat Guna
835	Penghargaan Humas
836	Penghargaan Lingkungan Hidup
837	Penghargaan Kemanusiaan
838	Penghargaan Kewirausahaan
839	Penghargaan Kesenian
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
	Meliputi tunjangan, perawatan kesehatan, koperasi, distribusi, perumahan / tanah, bantuan sosial, rekreasi, dan dispensasi.
841	Tunjangan
841.1	Jabatan,
841.2	Kehormatan
841.3	Kematian
841.4	Tunjangan Hari Raya
841.5	Perjalanan Dinas Tetap Cuti / Pindah
841.6	Keluarga
841.7	Pangan, uang makan
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Kesehatan
842.3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
844. 1	Distribusi Pangan
844.2	Distribusi Sandang
844.3	Distribusi Lainnya
845	Perumahan / Tanah
845.1	Perumahan Pegawai
845.2	Tanah Kapling

- 845.3 Losmen / Hotel
- 846 Bantuan Sosial
- 846.1 Bantuan Kebakaran
- 846.2 Bantuan Kebanjiran
- 847. Rekreasi
- 848 Dispensasi
- 849 -

850 CUTI

Meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti hamil, cuti naik haji, cuti di luar tanggungan negara dan cuti alasan lain

- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji
- 856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain
- 858 -
- 859 -

860 PENILAIAN

Meliputi penghargaan, hukuman, konduite, ujian dinas, penilaian kekayaan pribadi dan rehabilitasi

- 861 Penghargaan
- 861.1 Bintang / Satyalencana
- 861.2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- 861.3 Kenaikan Gaji Istimewa
- 861.4 Hadiah berupa Pangkat
- 861.5 Pegawai Teladan

- 862 Hukuman
- 862.1 Teguran / Peringatan
- 862.2 Penundaan Kenaikan Gaji
- 862.3 Penurunan Pangkat
- 862.4 Pemindahan / Mutasi
- 862.5 Pembebasan dari jabatan

Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887 dan 888

- 863 Konduite
- 863.1 DP3
- 863.2 Presensi

- 864 Ujian Dinas
- 864.1 Tingkat I
- 864.2 Tingkat II
- 864.3 Tingkat III

- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
Meliputi Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)

866	Rehabilitasi
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	Meliputi formasi, bezeting, registrasi, daftar riwayat, hak, penggajian, sumpah / janji dan Korps pegawai
871	Formasi
872	Bezeting
872.1	DUK
873	Registrasi
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
874.3	Kepartaian / Organisasi
874.4	Daftar Riwayat Hidup
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875. 1	Pelimpahan Wewenang
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Penggajian
876.1	SKPP
877	Sumpah / Janji
878	Korps Kepegawaian
879	Nota Pertimbangan
880	PEMBERHENTIAN
	Meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian dengan tidak hormat
881	Permintaan sendiri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol I
882.2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol II
882.3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol III
882.4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
883.1	Karena Meninggal dalam Tugas
884	Alasan Lain

- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 Pemberhentian Dengan Hormat

890 PENDIDIKAN PEGAWAIAN

Meliputi perencanaan, pendidikan reguler, pendidikan non formal, pendidikan ke luar negeri, metode, tenaga pengajar, administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan.

- 891 Perencanaan
- 892 Pendidikan Reguler
 - 892.1 IIP
 - 892.2 Akademi
 - 892.21 Agraria
 - 892.22 Pemerintahan Dalam Negeri
 - 892.3 Kursus-kursus Reguler
- 893 Pendidikan Non Reguler
 - 893.1 SESPA / Dikiat
 - 893.2 SELAPUTDA
 - 893.3 Kursus-kursus / Penataran
 - 893.4 Diklat Prajabatan
 - 893.5 Diklat Pimpinan
 - 893.6 Diklat Fungsional
 - 893.7 Diklat Teknis
 - 893.8 Bimtek
- 894 Pendidikan Ke Luar Negeri
 - 895 Metode
 - 895.1 Kuliah
 - 895.2 Ceramah, Symposium
 - 895.3 Diskusi
 - 895.4 Kuliah Lapangan, Widya Wisata, KKN
 - 895.5 Kurikulum
 - 895.6 KaryaTulis
- 896 Tenaga Pengajar
- 897 Akademi Pendidikan
 - 897.1 Tahun Pelajaran
 - 897.2 Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, ujian
- 898 Fasilitas
 - 898.1 Tunjangan Belajar
 - 898.2 Asrama
 - 898.3 Uang Makan
 - 898.4 Uang Transport
 - 898.5 Uang Buku
 - 899 Sarana
 - 899.1 Buku
 - 899.2 Gedung lihat 011; Peralatan lihat 020

900	KEUANGAN
901	-
902	-
903	-
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Rutin
912	Anggaran Belanja Tambahan
913	RASK
914	DASK Dokumen
915	-
916	-
917	-
918	-
919	-
920	OTORISASI
921	Rutin
922	-
923	SIAP
923.1	SIAPDA
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	-
932	-
933	-
934	SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
935	SPJ Pembangunan
936	-
937	-
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Dana Anggaran
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	SPM
945	SPM Pembangunan
946	SP Pemindah Bukuan
947	SPP
948	-

949

-

950

PERBENDAHARAAN

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Perbendaharaan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan / Pergantian Perbendaharaan
- 955 Specimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang
- 957 -
- 958 -
- 959 -

960

PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

- 961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan

- 963 Laporan Keuangan Bendahara
- 964 -
- 965 -
- 966 -
- 967 -
- 968 -
- 969 -

970

PENDAPATAN

- 971 Perimbangan Keuangan
- 971.1 Bagi Hasil Pajak
- 971.11 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- 971.12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
- 971.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)

- 971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
- 971.21 Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah
- 971.22 Provisi Sumber Daya Hutan
- 971.23 Sumber Daya Alam / Migas
- 971.24 Iuran Eksplorasi/Landrent

- 972 Subsidi

- 973 Pajak
- 973.1 Pajak Kendaraan Bermotor
- 973.2 Pajak Kendaraan Diatas Air
- 973.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 973.4 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
- 973.5 Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
- 973.6 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
- 973.7 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP

- 974 Restribusi
- 974.1 Restribusi Pelayanan Kesehatan
- 974.2 Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 974.3 Restribusi Tempat Pelelangan Ikan
- 974.4 Restribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila
- 974.5 Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

974.6	Restribusi Hasil Hutan
974.61	Pengendalian Kayu Lintas Kabupaten / Kota
974.62	Ijin Pemanfaatan Flora dan Fauna
974.64	Tempat Pelelangan Hasil Hutan
974.7	Restribusi Ijin pengambilan dan Pemanfaatan ABT / AP
974.8	Restribusi Bidang Metrologi
974.9	Restribusi Penyelenggaraan Perhubungan
974.91	Ijin Trayek
974.92	Pevelenggaraan Telkom
974.93	Dispensasi Kelebihan Muatan
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubemur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979. 1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
979. 11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979 2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian / Kehilangan Kekayaan Daerah (TP - TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet

979.54 Penerimaan Dan Dana Bergulir / Revolving
979.55 Kerjasama dengan BUMIDA
979.56 Penerimaan DUKS
979.57 Tempat Rekreasi
979.58 Setoran TP -TGR
979.59 Penerimaan lainnya dan Setda / Dinas-dinas

980 **PENGELUARAN**

981 -
982 -
983 -
984 -
985 -
986 -
987 -
988 -
989 -

990 **BENDA HARWAN**

991 SKPP
992 Teguran SPJ
993 -
994 -
995 -
996 -
997 -
998 -
999 -

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010